

DAFTAR ISI

Daftar Isi	hal	i
BAB I PENDAHULUAN	hal	1
A. Dasar Hukum	hal	1
B. Gambaran Umum Daerah	hal	5
1. Kondisi Geografis Daerah	hal	5
2. Gambaran Umum Demografis	hal	6
3. Gambaran Umum Perekonomian	hal	11
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	hal	39
A. Visi Dan Misi	hal	42
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	hal	46
C. Prioritas Daerah	hal	51
D. Sasaan dan Target Kinerja Pembangunan	hal	53
BAB III URUSAN DESENTRALISASI	hal	75
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi	hal	75
B. Urusan wajib	hal	75
C. Urusan Pilihan	hal	139
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	hal	159
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	hal	159
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	hal	162
A. Kerjasama Antar Daerah	hal	162
B. Kerjasama Luar Negeri	hal	163
C. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	hal	163
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	hal	164
E. Pembinaan Batas Wilayah	hal	165
F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	hal	168
G. Pengelolaan Kawasan Khusus	hal	170
H. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	hal	172
BAB VI PENUTUP	hal	173

BAB I

PENDAHULUAN

Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antar Pemerintah dengan daerah otonom (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta didasari oleh pertimbangan bahwa terdapat 5 (lima) urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yaitu: urusan dibidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang yustisi, bidang moneter dan bidang agama.

Disamping itu pembagian urusan pemerintahan juga didasarkan atas adanya hubungan kewenangan antar Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai satu sistem pemerintahan. Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan pelaksanaan asas desentralisasi pemerintahan pada masing-masing daerah, maka pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dijabarkan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, sehingga pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pembangunan sesuai potensi keunggulan dan kekhasan daerah.

A. DASAR HUKUM

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 36);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara 181.680,68 km², meliputi lautan 110.000 km² atau sekitar 60,5% dan daratan 71.680,68 km² atau sekitar 39,5%. Sebagian besar wilayah daratan berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-Pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 419 pulau yang terdiri dari 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatas dengan Selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wungu dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 436 kecamatan, 692 kelurahan dan 5.418 desa.

Menurut wilayah geografis, kabupaten/kota di Sumatera Utara dibagi dalam 3 kawasan, yaitu kawasan Pantai Barat dengan luas 26.189,07 km², kawasan Dataran Tinggi dengan luas 20.569,62 km², dan kawasan Pantai Timur dengan luas 24.921,99 km².

Kawasan Pantai Barat seluas 26.189,07 km² meliputi 9 kabupaten dan 3 kota yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

Kawasan dataran tinggi seluas 20.569,62 km² meliputi 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Kota Pematangsiantar.

Kawasan Pantai Timur seluas 24.921,99 km² meliputi 8 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Medan dan Binjai.

2. Gambaran Umum Demografis

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Proyeksi penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 14.102.911 jiwa dengan penduduk laki-laki adalah 7.037.326 jiwa (49,90%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.065.585 jiwa (50,10%). Sebagian besar penduduk berada di Kawasan Pantai Timur yang mencapai 8.792.979 jiwa (62,35%), Kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.613.312 jiwa (18,53%), dan Kawasan Pantai Barat sebanyak 2.696.620 jiwa (19,12%). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035

mencapai 1,36% pertahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010, yang mencapai 1,22% pertahun.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2016¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan	1.101.020	1.128.388	2.229.408
2	Binjai	133.692	134.209	267.901
3	Pematangsiantar	121.684	127.821	249.505
4	Padangsidempuan	103.709	109.208	212.917
5	Tanjungbalai	85.213	83.871	169.084
6	Tebing Tinggi	78.582	80.320	158.902
7	Gunungsitoli	67.410	70.283	137.693
8	Sibolga	43.515	43.274	86.789
9	Deli Serdang	1.043.114	1.029.407	2.072.521
10	Langkat	514.211	506.997	1.021.208
11	Simalungun	425.794	428.695	854.489
12	Asahan	357.900	354.784	712.684
13	Serdang Bedagai	306.620	304.286	610.906
14	Labuhanbatu	237.719	232.792	470.511
15	Mandailing Natal	213.682	221.621	435.303
16	Batu Bara	203.689	201.299	404.988
17	Karo	196.898	199.700	396.598
18	Labuhanbatu Utara	179.105	175.380	354.485
19	Tapanuli Tengah	179.194	177.724	356.918
20	Labuhanbatu Selatan	163.390	156.991	320.381
21	Nias Selatan	154.519	156.800	311.319
22	Tapanuli Utara	146.104	149.509	295.613
23	Dairi	140.200	140.410	280.610
24	Tapanuli Selatan	137.590	139.299	276.889
25	Padang Lawas	132.181	131.603	263.784
26	Padang Lawas Utara	129.514	128.293	257.807
27	Humbang Hasundutan	91.789	93.126	184.915
28	Tobasamosir	89.688	91.006	180.694
29	Nias	66.682	70.215	136.897
30	Nias Utara	66.816	68.197	135.013
31	Samosir	61.904	62.592	124.496

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
32	Nias Barat	40.805	44.486	85.291
33	Pakpak Bharat	23.393	22.999	46.392
Sumatera Utara		7.037.326	7.065.585	14.102.911

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Jumlah penduduk terbesar berada di Medan yang mencapai 2.229.408 jiwa atau 15,81% dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Deli Serdang yang mencapai 2.072.521 jiwa (14,70%), Langkat sebanyak 1.021.208 jiwa (7,24%), Simalungun sebanyak 854.489 jiwa (6,06%), Asahan sebanyak 712.684 jiwa (5,05%) dan Serdang Bedagai sebanyak 610.906 jiwa (4,33%).

Jumlah penduduk terkecil berada di Pakpak Bharat yang berjumlah 46.392 jiwa (0,33%), Nias Barat 85.291 jiwa (0,60%), Sibolga 86.789 jiwa (0,62%), Samosir 124.496 jiwa (0,88%), Nias Utara 135.013 jiwa (0,96%) dan Kota Gunungsitoli 137.693 jiwa (0,98%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 4%.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
1	Medan	2.229.408	8.413	15,81
2	Binjai	267.901	4.527	1,90
3	Pematangsiantar	249.505	4.483	1,77
4	Padangsidempuan	212.917	1.857	1,51
5	Tanjungbalai	169.084	1.568	1,20
6	Tebing Tinggi	158.902	5.126	1,13
7	Gunungsitoli	137.693	491	0,98
8	Sibolga	86.789	1.859	0,62
9	Deli Serdang	2.072.521	925	14,70
10	Langkat	1.021.208	163	7,24

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
11	Simalungun	854.489	196	6,06
12	Asahan	712.684	193	5,05
13	Serdang Bedagai	610.906	322	4,33
14	Labuhanbatu	470.511	219	3,34
15	Mandailing Natal	435.303	71	3,09
16	Batu Bara	404.988	440	2,87
17	Karo	396.598	187	2,81
18	Labuhanbatu Utara	354.485	100	2,51
19	Tapanuli Tengah	356.918	164	2,53
20	Labuhanbatu Selatan	320.381	90	2,27
21	Nias Selatan	311.319	171	2,21
22	Tapanuli Utara	295.613	78	2,10
23	Dairi	280.610	146	1,99
24	Tapanuli Selatan	276.889	46	1,96
25	Padang Lawas	263.784	68	1,87
26	Padang Lawas Utara	257.807	66	1,83
27	Humbang Hasundutan	184.915	80	1,31
28	Tobasamosir	180.694	78	1,28
29	Nias	136.897	75	0,97
30	Nias Utara	135.013	113	0,96
31	Samosir	124.496	61	0,88
32	Nias Barat	85.291	181	0,60
33	Pakpak Bharat	46.392	39	0,33
Sumatera Utara		14.102.911	194	100,00

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km² kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2016 mencapai 194 jiwa per km², dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Medan 8.413 jiwa per km², diikuti oleh Tebing Tinggi 5.126 jiwa per km², Binjai 4.527 jiwa per km², Pematangsiantar 4.483 jiwa per km², Sibolga 1.859 jiwa per km², Padangsidimpuan 1.857 jiwa per km² dan Tanjungbalai 1.568 jiwa per km².

Kepadatan penduduk terendah berada di Pakpak Bharat 39 jiwa per km², Tapanuli Selatan 46 jiwa per km², Samosir 61 jiwa per km², Padang Lawas Utara 66 jiwa per km², Padang Lawas 68 jiwa per km², Mandailing Natal 71 jiwa per km², Nias 75 jiwa per km², Toba Samosir dan Tapanuli Utara 78 jiwa per km², Humbang Hasundutan 80 jiwa per km², Labuhanbatu Selatan 90 jiwa per km², dan Labuhanbatu Utara 100 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016¹⁾

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0- 4	788.721	761.312	1.550.033	103,60
5- 9	781.210	747.969	1.528.906	104,48
10-14	720.571	686.098	1.406.669	105,02
15-19	680.271	653.368	1.333.639	104,12
20-24	614.844	602.350	1.217.194	102,07
25-29	549.139	545.296	1.094.435	100,70
30-34	516.381	523.421	1.039.802	98,66
35-39	481.313	490.921	972.234	98,04
40-44	440.983	450.870	891.853	97,81
45-49	392.762	409.237	801.999	95,97
50-54	339.138	358.469	697.607	94,61
55-59	279.725	295.253	574.978	94,74
60-64	199.724	210.432	410.156	94,91
65-69	117.138	136.205	253.343	86,00
70-74	71.047	92.963	164.010	76,43
75+	64.359	101.694	166.053	63,29
TOTAL	7.037.326	7.065.585	14.102.911	99,60

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

3. Gambaran Umum Perekonomian

3.1 Potensi Unggulan

a. Sumber Energi

Berbagai kebijakan energi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rasional, optimal dan terpadu adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang–Undang Dasar 1945.

Kondisi saat ini energi telah berubah menjadi suatu hal yang sangat mendesak dan kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- 2) Tidak mencukupinya pasokan energi untuk kebutuhan energi domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar.
- 3) Pemanfaatan energi tidak efisien.
- 4) Harga energi belum memenuhi harga keekonomian.
- 5) Iklim investasi energi masih rendah.
- 6) Kapasitas industri energi nasional masih rendah.
- 7) Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir,

Tapanuli Utara, Padang Lawas dan Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 kabupaten/kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Kota Binjai, dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sebesar 46.431,88 MSTB.

Tabel 1.4
Potensi Minyak Bumi Tahun 2016

Kabupaten	Cadangan (MSTB)* Minyak Bumi		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	19.466	6.884	3.310
Deli Serdang	7.551	31	27
Binjai	5.207	0	0
Medan	674	686	594
Padang Lawas	2.000	0	0
Total	34.898	7.602	3.931

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

*Ket : *MSTB = Thousand Stock Tank Barrel/ribu barrel tanki pengumpul*

Potensi/cadangan Gas Bumi Sumatera Utara yang terdata adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari potensi/cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF, potensi/ cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan potensi/cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF.

Tabel 1.5
Potensi Gas Bumi Tahun 2016

Kabupaten	Cadangan (MMSCF)* Gas		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	233.591	54.797	25.893
Deli Serdang	143.065	0	0
Binjai	37.810	0	0
Medan	3.933	1.681	1.449
Offshore Medan - Langkat	54.000	0	0
Total	472.399	56.478	27.342

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Ket : *MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta kaki kubik

Cadangan batu bara terdapat di 15 titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai.

Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, Padang Lawas, Labuhanbatu Utara, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli, dimana hingga saat ini dalam tahap penyelidikan umum.

Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batugamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmer, granit, belerang, andesit, serpentin, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumberdaya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti).

b. Hidrologi

1) Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, anak sungai sebanyak 783 buah, ranting sungai 659 buah, anak ranting sungai 342 buah.

2) Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 Satuan Wilayah Sungai (WS) berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Provinsi Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas Kabupaten/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Provinsi Sumatera Utara memiliki luas baku daerah rawa sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3) Debit Air

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat

menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Balimbing di Tapanuli Selatan, Danau Lau Kwar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 kabupaten dengan luas 110.260 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Tonang, juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

c. Klimatologi

1) Tipe

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 – 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3) Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80° C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

4) Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

d. Penggunaan Lahan

1) Kawasan lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 Ha atau 42,63% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha). Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha)

- Kawasan Suaka Alam (KSA)/ : 427.008,00 Ha
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/
Taman Buru (TB)
- Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha

Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.906,00 ha)

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.770,00 Ha
- Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
- Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi (HPK) : 75.684,00 Ha

Di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan yang berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45%, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15%, bercurah

hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung.

Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias.

2) Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi seluas 380.201 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas \pm 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal,

Tapaneli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat adalah sekitar 2,1 juta Ha, dengan total produksi sebesar \pm 5,6 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km² dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai

Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 Ha.

Potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara meliputi pariwisata alam (kawasan Danau Toba, Berastagi, Kawasan Ekosistem Gunung Leuser dan Bukit Lawang Bahorok, Sibolangit, pantai di Kepulauan Nias, dan lain-lain), pariwisata budaya (Istana Maimun, Kediaman Chong A Fie, Makam Sisingamangaraja XII, Peninggalan Megalit di Pulau Nias, dan lain-lain) dan pariwisata minat khusus (Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman, Paralayang di Sitopsi, dan lain-lain).

e. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Sumatera Utara berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Sumatera Utara yang diwujudkan dalam penetapan

pusat-pusat kegiatan wilayah dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan lokal saling terkoneksi.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi : (a) untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan(c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan : (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1) Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi :

- Merek, Kabupaten Karo;
- Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
- Harian, Kabupaten Samosir;

- Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- 2) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Simalungun – Batu Bara – Asahan meliputi:
- Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
 - Kawasan Simalungun – Batubara;
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke yang telah beroperasi sejak 27 Januari 2015;
 - Kawasan pengembangan industri berbasis aluminium dan diversifikasi aluminium yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke dan didukung oleh Global Hubungan Internasional Kuala Tanjung yang telah dilakukan *Groundbreaking* pada tanggal 27 Januari 2015.
- 3) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
- 4) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :
- Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
 - Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 - Kawasan Perkotaan Padang Sidempuan dan sekitarnya.
- 5) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Kepulauan Nias.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

- 1) Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi:
- Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;

- Bangunan bersejarah dikoridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 - Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Kawasan religidan situs candi/biara di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
 - 3) Kawasan tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya.
 - 4) Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - 5) Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- 1) Kawasan ekosistem Leuser dan Bahorok.
- 2) Kawasan konservasi hutan Batang Toru.
- 3) Kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Provinsi Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu :

- 1) Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di kawasan perbatasan laut Republik Indonesia dengan Malaysia;
- 2) Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- 3) Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Pada Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun

2016 tumbuh sebesar 5,18% melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% pada tahun yang sama.

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 Tahun 2013-2016 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Tahun			
	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,71	4,37	5,47	4,86
B. Pertambangan & Penggalian	26,03	5,16	6,10	5,68
C. Industri Pengolahan	4,84	3,00	3,63	4,48
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	-3,98	9,28	2,28	3,77
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,68	6,04	6,44	6,71
F. Konstruksi	7,66	6,79	5,52	5,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,57	6,94	4,37	5,75
H. Transportasi dan Pergudangan	7,41	5,57	5,68	6,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,81	6,48	6,95	6,54
J. Informasi dan Komunikasi	7,78	7,23	7,11	7,76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,59	2,62	7,17	4,11
L. Real Estate	6,94	6,59	5,76	5,90
M,N. Jasa Perusahaan	6,68	6,76	5,86	5,95
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,34	6,92	5,83	1,98
P. Jasa Pendidikan	8,34	6,37	5,03	4,90
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	10,82	6,72	7,21	7,37
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,45	7,04	6,69	6,50
PDRB	6,07	5,23	5,10	5,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan sebesar 5,18%. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan

positif pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,76% dibanding dengan lapangan usaha lainnya. Diikuti oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,37%, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 6,71%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 6,54%, lapangan usaha jasa lainnya 6,50%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan 6,07%, lapangan usaha jasa perusahaan 5,95%, lapangan usaha real estate 5,90%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 5,75%, lapangan usaha pertambangan dan penggalian 5,68%, lapangan usaha konstruksi 5,60%. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh dibawah 5%.

Tabel 1.7
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2015-2016 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2015 ^{*)}	Tahun 2016 ^{**)}	Tahun 2015 ^{*)}	Tahun 2016 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	125.902,71	136.048,21	109.962,98	115 308,88
B. Pertambangan & Penggalian	7.662,92	8.474,41	5.814,94	6 144,99
C. Industri Pengolahan	115.535,02	125.579,55	86.081,40	89 941,99
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	640,09	640,36	593,97	616,39
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	572,26	660,56	421,96	450,27
F. Konstruksi	77.801,96	84.232,50	54.248,91	57 286,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.521,14	112.438,92	77.037,55	81 487,72
H. Transportasi dan Pergudangan	28.556,71	31.828,20	20.165,19	21 389,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.786,21	14.934,25	9.866,78	10 512,20

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2015 ^{*)}	Tahun 2016 ^{**)}	Tahun 2015 ^{*)}	Tahun 2016 ^{**)}
J. Informasi dan Komunikasi	11.124,25	12.194,59	11.055,36	11 913,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	19.144,95	20.763,25	13.957,95	14 531,04
L. Real Estate	25.712,58	29.716,16	18.119,22	19 187,89
M,N. Jasa Perusahaan	5.452,33	6.287,02	3.836,94	4 065,40
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.234,54	22.893,55	14.642,06	14 931,58
S. Jasa Pendidikan	10.723,82	12.220,60	8.904,74	9 341,37
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	5.328,76	5.958,50	4.066,72	4 366,28
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.021,75	3.523,51	2.179,18	2 320,88
PDRB	571.722,01	628.394,16	440.955,85	463.775,46

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2016 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 628,39 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp. 463,78 triliun. PDRB atas dasar harga berlaku yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2016 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp. 136,09 triliun, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan Rp. 125,58 triliun, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp. 112,44 triliun, lapangan usaha konstruksi Rp. 84,23 triliun, lapangan usaha transportasi dan pergudangan Rp. 31,83 triliun, lapangan usahareal estate Rp. 29,72 triliun, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp. 22,89 triliun, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi Rp. 20,76 triliun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum Rp. 14,93 triliun, lapangan usaha jasa pendidikan

Rp. 12,22 triliun, lapangan usaha informasi dan komunikasi Rp. 12,19 triliun. Lapangan usaha lainnya memberikan nilai tambah dibawah 10 triliun.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2016 mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara sebesar 21,65%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan 19,98%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 17,89%, lapangan usaha konstruksi 13,40%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan 5,07%. Lapangan usaha yang lain memberi kontribusi dibawah 5%.

Tabel 1.8
PDRB Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2015-2016 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2015 ^{*)}	Tahun 2016 ^{**)}	Tahun 2015 ^{*)}	Tahun 2016 ^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	306.071,86	333.511,72	225.907,47	237.688,14
2. Konsumsi LNPRT	5.258,70	5.708,82	4.515,28	4.683,87
3. Konsumsi Pemerintah	43.740,45	46.012,72	31.050,20	30.933,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	182.367,64	198.592,88	128.952,21	135.149,53
5. Perubahan Inventori	13.119,11	9.047,44	10.958,43	7.797,44
6. Ekspor Barang dan Jasa	210.230,99	239.233,56	189.848,62	194.957,79
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	189.066,74	203.698,78	150.276,35	147.434,43
PDRB	571.722,01	628.394,16	440.955,85	463.775,46

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2016, komponen konsumsi rumah tangga bila dibandingkan dengan tahun 2015, merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 5,21%, atau dari Rp. 225,91 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 237,69 triliun pada tahun 2016, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto meningkat 4,81% atau dari Rp. 128,95 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 135,15 triliun pada tahun 2016, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit meningkat 3,73%, atau dari Rp. 4,52 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 4,68 triliun pada tahun 2016 dan komponen ekspor barang dan jasa meningkat 2,69%, atau dari Rp. 189,85 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 194,96 triliun pada tahun 2016. Sedangkan komponen lainnya mengalami penurunan, yakni komponen pengeluaran konsumsi pemerintah turun 0,38%, komponen impor barang dan jasa turun 1,89%.

Atas dasar harga berlaku, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga naik dari Rp. 306,07 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 333,51 triliun pada tahun 2016 atau naik 8,96%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit atas dasar harga berlaku juga naik dari Rp. 5,26 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 5,71 triliun pada tahun 2016, atau naik 8,56%. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 43,74 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 46,01 triliun pada tahun 2016, atau meningkat 5,19%.

Komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 182,37 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 198,59 triliun pada tahun 2016, atau naik 8,90%.

Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 210,23 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 239,23 triliun pada tahun 2016, atau meningkat 13,80 %. Nilai impor barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 189,07 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 203,70 triliun pada tahun 2016, atau meningkat 7,74 %.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Utara, sebesar 53,07 %, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 31,60 %, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 7,32 %, komponen ekspor barang dan jasa netto 5,65 % (ekspor barang dan jasa 38,07 % dan impor barang dan jasa 32,42 %), komponen pengeluaran perubahan inventori 1,44 % dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,91 %.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 yang mencapai 5,18 %, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi sumbangan sebesar 2,67 %, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 1,41 %, komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa neto 0,52 % (ekspor barang dan jasa 1,16 % dan impor barang dan jasa -0,64 %), komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,04 %, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah -0,03 %, dan komponen pengeluaran perubahan inventori -0,72 %.

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
01. Nias	6,27	6,35	5,47	5,43
02. Mandailing Natal	6,27	6,37	6,52	6,22
03. Tapanuli Selatan	9,09	17,43	4,43	5,02
04. Tapanuli Tengah	5,11	5,18	5,04	5,08
05. Tapanuli Utara	4,90	5,27	5,11	4,81
06. Tobasamosir	5,08	4,85	4,23	4,55
07. Labuhanbatu	6,09	5,98	5,22	5,04
08. Asahan	5,51	5,71	5,89	5,57
09. Simalungun	6,06	5,25	5,33	5,24
10. Dairi	5,03	5,05	5,03	5,04
11. Karo	5,09	4,95	5,09	5,01
12. Deli Serdang	4,99	9,22	7,51	5,25
13. Langkat	6,45	5,61	5,12	5,03
14. Nias Selatan	5,18	4,65	4,32	4,46
15. Humbang Hasundutan	5,59	5,72	5,32	5,24
16. Pakpak Bharat	6,01	5,91	5,92	5,93
17. Samosir	6,05	6,10	5,95	5,77
18. Serdang Bedagai	6,09	5,80	5,12	5,05
19. Batubara	5,72	4,23	4,20	4,11
20. Padang Lawas Utara	6,38	6,15	6,08	5,94
21. Padang Lawas	6,21	6,14	5,97	5,74
22. Labuhanbatu Selatan	6,33	6,05	5,32	5,13
23. Labuhanbatu Utara	6,36	6,27	5,39	5,18
24. Nias Utara	6,21	6,34	5,56	5,49
25. Nias Barat	6,55	5,17	5,12	4,87
26. Sibolga	5,75	5,96	5,89	5,65
27. Tanjungbalai	6,22	5,94	5,78	5,58
28. Pematangsiantar	6,64	5,75	6,34	5,24
29. Tebing Tinggi	5,75	6,01	5,45	4,86
30. Medan	7,66	5,36	6,08	5,74
31. Binjai	6,06	6,07	5,83	5,40
32. Padangsidempuan	5,90	5,80	5,17	5,04
33. Gunungsitoli	6,18	6,22	6,10	5,39
Sumatera Utara	6,45	6,07	5,23	5,10

Sumber : BPS Provsu

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2015 se Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada kisaran 4,11 % sampai dengan 6,22 %. Mandailing Natal merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,22 %, diikuti oleh Padang Lawas Utara 5,94 %, Pakpak Bharat 5,93 %, Samosir 5,77 %, Kota Medan dan Padang Lawas 5,74 %. Sedangkan Batu Bara merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 4,11 %, diikuti Nias Selatan 4,46 %, Toba Samosir 4,55 %, Tapanuli Utara sebesar 4,81 % dan Tebing Tinggi 4,86 %.

Tabel 1.10
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
01. N i a s	1.764,61	1.969,17	2.206,37	2.430,72	2.669,90
02. Mandailing Natal	6.199,33	6.952,47	7.874,04	8.758,76	9.598,75
03. Tapanuli Selatan	5.975,00	6.907,92	8.737,00	9.308,33	10.105,98
04. Tapanuli Tengah	4.899,76	5.353,46	5.914,05	6.516,46	7.140,28
05. Tapanuli Utara	4.196,26	4.606,31	4.984,01	5.383,65	5.828,15
06 Tobasamosir	3.952,03	4.317,21	4.735,41	5.176,74	5.633,72
07 Labuhanbatu	16.378,79	18.004,42	20.117,62	22.178,00	24.133,38
08 A s a h a n	17.993,43	19.847,90	22.064,96	24.302,72	26.541,79
09 Simalungun	18.991,30	20.932,78	23.232,51	25.338,49	27.237,46
10 D a i r i	4.687,61	5.133,02	5.711,56	6.268,08	6.823,16
11 K a r o	10.293,69	11.244,86	12.660,73	13.817,09	15.150,36
12 Deli Serdang	48.370,56	52.695,59	61.061,85	69.603,68	76.735,64
13 L a n g k a t	20.807,04	22.894,70	25.423,58	27.769,54	30.351,77
14 Nias Selatan	3.136,26	3.479,98	3.898,78	4.305,08	4.742,91
15 H. Hasundutan	2.963,20	3.297,01	3.661,72	4.062,92	4.481,92
16 Pakpak Bharat	564,04	621,39	686,76	752,38	829,19
17 Samosir	2.073,10	2.285,89	2.546,78	2.823,07	3.143,81
18 Serdang Bedagai	13.651,11	14.991,16	16.744,97	18.457,29	20.166,08
19 Batubara	17.898,92	19.610,30	21.232,54	23.437,51	24.934,40

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
20 Padang Lawas Utara	5.475,50	6.016,56	6.756,27	7.477,28	8.244,71
21 Padang Lawas	5.343,35	5.911,69	6.631,30	7.288,06	7.902,93
22 Labuhanbatu Selatan	13.066,07	14.380,77	15.997,15	17.600,72	19.070,67
23 Labuhanbatu Utara	12.063,36	13.294,02	14.799,80	16.262,17	17.586,81
24 Nias Utara	1.646,01	1.840,58	2.089,32	2.303,44	2.517,21
25 Nias Barat	873,23	964,18	1.082,59	1.181,46	1.273,17
26 Sibolga	2.445,83	2.702,74	3.057,12	3.426,51	3.827,17
27 Tanjungbalai	3.899,96	4.327,27	4.855,84	5.426,08	6.027,32
28 Pematangsiantar	6.741,29	7.523,32	8.487,29	9.555,19	10.565,48
29 Tebing Tinggi	2.761,38	3.075,25	3.514,00	3.934,67	4.304,35
30 Medan	104.059,43	117.487,21	131.604,64	147.683,86	164.628,28
31 Binjai	5.526,23	6.149,90	6.868,46	7.643,41	8.447,41
32 Padangsidempuan	2.921,97	3.246,36	3.616,69	3.997,56	4.424,34
33 Gunungsitoli	2.279,19	2.547,64	2.871,84	3.210,03	3.573,44
Sumatera Utara	377.037,10	417.120,44	469.464,02	521.954,95	571.722,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pada tahun 2015, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara sebesar 28,80%, Deli Serdang 13,42%, Langkat 5,31%, Simalungun 4,76%, Asahan 4,64%, Batu Bara 4,36% dan Labuhanbatu 4,22%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi relatif kecil, yakni : Serdang Bedagai 3,53%, Labuhanbatu Selatan 3,34%, Labuhanbatu Utara 3,08%, Karo 2,65%, Pematangsiantar 1,85%, Tapanuli Selatan 1,77%, Mandailing Natal 1,68%, Binjai 1,48%, Padang Lawas Utara 1,44%, Kabupaten Padang Lawas 1,38%, Tapanuli Tengah 1,25%, Dairi 1,19%, Tapanuli Utara 1,02%, Kota Tanjungbalai 1,05%. Kontribusi di bawah 1% yaitu Toba Samosir 0,98%, Nias Selatan 0,83%, Humbang Hasudutan 0,78%, Kota Padangsidempuan 0,77%, Kota Tebing Tinggi 0,75%, Kota Sibolga 0,67%, Kota Gunungsitoli 0,62%, Samosir 0,55%, Nias 0,47%, Nias Utara 0,44%, Nias Barat 0,22%, dan Pakpak Bharat 0,14%.

Tabel 1.11
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
01. N i a s	1.776,05	1.888,76	1.991,99	2.100,11
02. Mandailing Natal	6.210,82	6.606,44	7.036,90	7.474,42
03. Tapanuli Selatan	6.150,49	7.222,61	7.542,78	7.921,24
04. Tapanuli Tengah	4.943,04	5.199,02	5.460,85	5.738,32
05. Tapanuli Utara	4.198,63	4.419,77	4.645,42	4.868,95
06. Tobasamosir	3.985,21	4.178,50	4.355,07	4.553,17
07. Labuhanbatu	16.289,98	17.263,41	18.164,10	19.079,93
08. A s a h a n	17.872,41	18.892,62	20.004,51	21.118,75
09. Simalungun	19.117,54	20.122,01	21.194,28	22.305,43
10. Dairi	4.671,00	4.906,86	5.153,83	5.413,75
11. Karo	10.258,23	10.765,99	11.314,39	11.880,93
12. Deli Serdang	47.513,87	51.896,06	55.793,75	58.722,46
13. L a n g k a t	20.858,68	22.029,48	23.157,01	24.321,61
14. Nias Selatan	3.074,46	3.217,40	3.356,39	3.506,03
15. Humbang Hasundutan	2.948,18	3.085,20	3.249,45	3.419,57
16. Pakpak Bharat	569,86	603,55	639,29	677,18
17. Samosir	2.105,65	2.234,09	2.367,10	2.503,73
18. Serdang Bedagai	13.558,85	14.345,76	15.080,38	15.841,75
19. Batubara	17.916,36	18.674,62	19.459,38	20.259,69
20. Padang Lawas Utara	5.531,49	5.871,51	6.228,35	6.598,30
21. Padang Lawas	5.332,02	5.659,62	5.997,31	6.341,53
22. Labuhanbatu Selatan	13.024,49	13.812,09	14.547,52	15.294,17
23. Labuhanbatu Utara	11.978,44	12.729,04	13.414,53	14.109,37
24. Nias Utara	1.645,93	1.750,25	1.847,62	1.948,96
25. Nias Barat	877,93	923,29	970,55	1.017,8
26. S i b o l g a	2.458,50	2.605,01	2.758,57	2.914,51
27. Tanjungbalai	3.919,55	4.152,39	4.392,58	4.637,50
28. Pematangsiantar	6.753,56	7.141,86	7.594,53	7.992,32
29. Tebing Tinggi	2.758,87	2.924,75	3.084,05	3.234,05
30. M e d a n	105.162,00	110.795,42	117.528,08	124.277,48
31. B i n j a i	5.553,63	5.890,97	6.234,29	6.571,20
32. Padangsidempuan	2.952,72	3.124,02	3.285,46	3.451,08
33. Gunungsitoli	2.276,15	2.417,72	2.565,26	2.703,50
Sumatera Utara	375.924,14	398.727,14	419.573,31	440.955,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2015 se Sumatera Utara tertinggi di Kota Medan sebesar Rp. 74,47 juta, diikuti oleh Kabupaten Batu Bara Rp. 62,21 juta, Labuhanbatu Selatan Rp. 60,76 juta, Labuhanbatu Rp. 52,22 juta dan Labuhanbatu Utara Rp. 50,09 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten yang paling rendah PDRB per kapita sebesar Rp. 14,99 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Selatan Rp. 15,38 juta, Pakpak Bharat Rp. 18,22 juta, Nias Utara Rp. 18,80 juta dan Nias Rp. 19,62 juta.

Tabel 1.12

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
01 Nias	14.738.113	16.407.994	17.962.919	19.615.054
02 Mandailing Natal	16.685.227	18.677.508	20.542.051	22.276.369
03 Tapanuli Selatan	25.689.539	32.233.537	34.079.958	36.735.923
04 Tapanuli Tengah	16.311.087	17.622.674	19.003.862	20.399.797
05 Tapanuli Utara	16.115.965	17.279.973	18.509.155	19.864.254
06 Tobasamosir	24.512.910	26.689.055	28.990.325	31.350.016
07 Labuhanbatu	41.325.449	45.235.379	48.890.070	52.215.158
08 Asahan	28.953.392	31.852.132	34.732.059	37.579.546
09 Simalungun	25.151.339	27.714.006	30.020.733	32.066.519
10 Dairi	18.719.100	20.693.674	22.581.579	24.447.890
11 Karo	30.565.576	33.725.794	36.111.593	38.887.871
12 Deli Serdang	27.816.360	31.472.214	35.071.929	37.813.698
13 Langkat	23.168.392	25.499.087	27.604.876	29.950.879
14 Nias Selatan	11.678.799	12.925.145	14.114.547	15.385.019
15 HumbangHasundutan	18.651.726	20.459.726	22.443.857	24.492.561
16 Pakpak Bharat	14.561.550	15.753.861	16.899.824	18.217.459
17 Samosir	18.796.432	20.798.666	22.939.703	25.396.554
18 Serdang Bedagai	24.935.361	27.729.342	30.439.133	33.130.250
19 Batubara	50.644.210	54.183.712	59.114.116	62.211.108
20 Padang Lawas Utara	25.462.590	27.932.222	30.237.359	32.640.831
21 Padang Lawas	24.664.320	26.990.278	28.929.261	30.631.142
22 Labuhanbatu Selatan	48.980.141	53.250.686	57.299.419	60.757.075
23 Labuhanbatu Utara	39.097.173	43.045.191	46.802.312	50.091.023

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
24 Nias Utara	14.133.744	15.892.817	17.353.642	18.799.635
25 Nias Barat	11.574.735	12.924.542	13.995.242	14.993.104
26 Sibolga	31.608.001	35.627.844	39.766.246	44.235.015
27 Tanjungbalai	27.045.424	29.890.545	32.950.264	36.089.133
28 Pematangsiantar	31.290.837	34.954.033	38.984.214	42.704.161
29 Tebing Tinggi	20.435.197	23.029.966	25.417.116	27.448.574
30 Medan	54.667.741	60.628.387	67.400.469	74.471.406
31 Binjai	24.162.562	26.619.964	29.230.222	31.914.696
32 Padangsidimpuan	16.265.737	17.803.427	19.359.001	21.088.778
33 Gunungsitoli	19.526.811	21.691.976	23.920.469	26.276.261
Sumatera Utara	31.109.349	34.544.178	37.913.896	41.019.539

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Berdasarkan pengamatan di 4 kota penghitungan inflasi Sumatera Utara tahun 2016, yakni Kota Medan sebesar 6,60%, Kota Pematangsiantar sebesar 4,76%, Kota Sibolga sebesar 7,39%, dan Kota Padangsidimpuan sebesar 4,28%. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2016 mencapai 6,34%, lebih tinggi dari inflasi Nasional yang mencapai 3,02%.

Tabel 1.13
Perkembangan Inflasi 4 Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2016(Persen)

Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	P. Sidimpuan	Sumut	Nasional
2005	22,91	19,67	22,39	18,47	22,41	17,11
2006	5,97	6,06	5,03	10,02	6,11	6,60
2007	6,42	8,37	7,13	5,87	6,60	6,59
2008	10,63	10,16	12,36	12,34	10,72	11,06
2009	2,69	2,72	1,59	1,87	2,61	2,78
2010	7,65	9,68	11,83	7,42	8,00	6,96
2011	3,54	4,25	3,71	4,66	3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54	3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82	10,18	8,38

Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	P. Sidimpuan	Sumut	Nasional
2014	8,24	7,94	8,36	7,38	8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66	3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28	6,34	3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Kegiatan perdagangan luar negeri Sumatera Utara hingga bulan Desember 2016 telah mencatat surplus sebesar US\$ 3,84 miliar dengan ekspor sebesar US\$ 7,76 miliar dan impor sebesar US\$ 3,92 miliar.

Tabel 1.14
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2005-2016

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2005	8.174.804	4.563.075	3.717.119	1.178.006	3.385.069
2006	8.704.825	5.523.900	4.404.172	1.456.987	4.066.913
2007	7.841.872	7.082.899	4.745.767	2.109.879	4.973.020
2008	8.520.892	9.261.976	5.880.760	3.696.064	5.565.913
2009	8.058.927	6.460.118	5.236.554	2.724.234	3.735.884
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.891	9.598.008	6.949.116	5.108.512	4.489.497
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.200	7.752.786	6.854.082	3.988.411	3.764.377
2016	8.377.933	7.762.194	6.802.360	3.919.457	3.842.737

Sumber :Badan Pusat Statistik Provsu

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dikenal sebagai NAWACITA dan TRISAKTI yang terdiri dari :

NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

TRISAKTI, yaitu :

- 1) Berdaulat dalam bidang politik, antara lain :
 - a. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
 - b. Memperkuat sistem pertahanan negara.
 - c. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.

- d. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
- e. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
- f. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
- g. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
- h. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
- i. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
- j. Pemberdayaan perempuan dalam politik dan pembangunan.
- k. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
- l. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

2) Berdikari dalam bidang ekonomi, antara lain:

- a. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
- b. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
- c. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
- d. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR dan/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
- e. Membangun pemberdayaan buruh.
- f. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
- g. Penguatan investasi domestik.
- h. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
- i. Membangun infrastruktur.
- j. Membangun ekonomi maritim.
- k. Penguatan sektor kehutanan.
- l. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
- m. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
- n. Membangun karakter dan potensi wisata.
- o. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.

p. Pengembangan industri manufaktur.

3) Berkepribadian dalam bidang kebudayaan :

- a. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
- b. Akan mempertahankan kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
- c. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis bagi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2018 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

RPJMD Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan :

- 1) Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 2) Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 3) Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode tahun anggaran 2013-2018.

- 4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2018.

A. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah tahap III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013–2018 adalah :

” MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

- a. **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- b. **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- c. **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan

- golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- d. **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
 - e. **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

2. Misi

Misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain untuk :

- a. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.

- b. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.

Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

- c. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.

Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan

menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus.

- d. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- e. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan

sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan system ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dengan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1. Strategi Pembangunan Daerah

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- b. Meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia.
- e. Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan.
- b. Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Keempat** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemeratakan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi.
- b. Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kelima** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
- b. Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH.
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

- d. Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- e. Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian.
- f. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Agenda Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain : transportasi, permukiman, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, transportasi, permukiman, pelayanan

kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

b. Agenda Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti infrastruktur, kesehatan, prasarana layanan umum lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

c. Agenda kebijakan Tahun ketiga (Tahun 2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan

tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Sumatera Utara.

d. Agenda Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing.

e. Agenda Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2018)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

C. Prioritas Daerah

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 dapat digambarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun berjalan akan diprioritaskan kepada 9 prioritas yakni :

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah.
5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.
8. Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan.
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah, meliputi:
 - a. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.
 - b. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
 - c. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGS) 2011-2015.
 - d. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.
 - e. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.
 - f. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.

- g. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pengarusutamaan gender (RAD - PUG).
- h. Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

D. SASARAN DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Prioritas 1

Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Sasaran utama yang ingin dicapai antara lain :

Tabel 2.1
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Satu

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
1	Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisaan antar umat beragama	1	Terselenggaranya kegiatan keagamaan khususnya aparatur, pemuda/pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
		2	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan agama, lembaga pemuda, lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, 1000 lembaga.
		3	Terlaksananya perbaikan kualitas rumah ibadah, 1000 unit.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
2	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan untuk peningkatan wawasan kebangsaan.	
3	Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	1	Terselesaikannya tata batas antar kabupaten/kota (7 kabupaten/kota) dalam wilayah Provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara (Riau, Sumatera Barat).
		2	Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum dan politik, 2 kegiatan.
4	Meningkatnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Terwujudnya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah.
		2	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
		3	Terwujudnya Program Legislasi Daerah (Prolegda).
5	Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum	Terlaksananya pembinaan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum, 4 kegiatan.	
6	Terwujudnya iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah	Terciptanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung peningkatan pelayanan perijinan satu atap, 1 Perda.	

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.	
8	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Terwujudnya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	1	Terselaraskannya program perencanaan dan penganggaran minimal 90 %.
		2	Tersedianya hasil kajian perencanaan dan pengendalian pembangunan, 8 dokumen perencanaan.
		3	perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana/prasarana dan penataan ruang/ lingkungan hidup, 20 kegiatan.
11	Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) secara elektronik (<i>e-Planning</i>) untuk mendukung <i>e-Government</i> , 1 Sistem Informasi.	
12	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan.	

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
13	Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta	Terselenggaranya pertemuan dan forum kerjasama antar Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, luar negeri dan swasta (<i>public private partnership</i>).

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 2

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

Tabel 2.2
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Dua

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
1	Tercapainya Indeks Pendidikan	1 Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun 98,8 %
		2 Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10,5 Tahun
		3 Angka Putus Sekolah 1,86 %
		4 IPM menjadi 77,36
2	Meningkatnya Partisipasi Sekolah	1 APK PAUD 49,43 %
		2 APK SD/MI 107,10 %
		3 APM SD/MI 94,80 %
		4 APK SMP/MTs 93,01 %
		5 APM SMP/MTs 78,60 %
		6 APK SLTA /MA/SMK 87,6 %
		7 APM SLTA/MA/SMK 72 %
		8 APK Perguruan Tinggi 33,36%

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana	1	S1/D-IV 60,45 %
		2	Pasca Sarjana (S2/S3) 20 %
4	Peningkatan Sertifikasi Guru	Guru bersertifikasi 10.000 Guru (sudah tersertifikasi 235.855 guru dan sisa belum tersertifikasi 27.145 guru).	
5	Peningkatan Kesejahteraan Guru	Insentif Guru : Rp 900.000/thn/org.	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 3

Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan, sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai adalah :

Tabel 2.3
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Tiga

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
1	Tercapainya Indeks Kesehatan	1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup 71,9 tahun.
		2	Angka Kematian Bayi 1000 KH :20
		3	Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 250/100.000 KH.
		4	Prevalensi balita kekurangan gizi menjadi 21%.
2	Layanan Kesehatan Dasar	1	Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi 90 %.
		2	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi menjadi 95 %.
		3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
		4	Desa/kelurahan Universal Child Immunization menjadi 80 %.
		5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menjadi 100 %.
		6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menjadi 100%
		7	Cakupan kunjungan bayi menjadi 95 %.
		8	Persentase <i>Case Detection Rate</i> (CDR) TB, 85% dan persentase keberhasilan pengobatan 95%.
		9	Cakupan Puskesmas menjadi Puskesmas ISO, Puskesmas Model Pelayanan Prima, dan Puskesmas Perkotaan menjadi 30 Unit.
		10	Cakupan atau ratio puskesmas/jumlah penduduk : 1 : 23.000.
		11	Cakupan atau ratio puskesmas pembantu (Pustu)/jumlah penduduk menjadi = 1 : 6.700.
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 %.
		2	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %.
4	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam menjadi 100 %.	
5	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif menjadi 35 %	

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
6	Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 59 %.
7	Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin	1	Subsidi Jamkesmas 33 Kab/Kota.
		2	Subsidi Jampersal 33 Kab/Kota.
8	Meningkatkan upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan		Perbaikan sarana sanitasi dasar permukiman bagi keluarga miskin perkotaan 20 rumah.
9	Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui revitaliasi Posyandu	1	Penyuluhan dan pelatihan bagi kader pelayanan kesehatan di posyandu 2 kali.
		2	Penyebarluasan informasi melalui TV 12 kali, Radio 100 kali, dan leaflet, sticker, poster, 33 kabupaten/kota.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 4

Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing ekonomi, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah :

Tabel 2.4
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Empat

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
1	Meningkatnya daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama	1	Pembangunan/peningkatan jalan provinsi sepanjang 338,50 Km.
		2	Pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 69 Km.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
	pada Kawasan Andalan, Daerah Tujuan Wisata, Daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Diagonal	3	Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.838,64 Km.
		4	Pembangunan/rehab jembatan 440,50 m.
		5	Pemeliharaan rutin jembatan 12.115 m.
		6	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 89,08%.
		7	Mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/ <i>Public Private Partnership</i> .
2	Meningkatnya aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan	1	Pembangunan Jalan Produksi 25 km (lebar 3 m).
		2	Pembangunan Jalan Usaha Tani 50 km (lebar 3 m).
3	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Rasio jaringan irigasi rawa kondisi baik 78,00%.
		2	Berfungsinya jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi 74,93%.
4	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku di 50 embung/waduk.	
5	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir 83,67%.	
6	Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Normalisasi/Pelurusan alur sungai/Perbaikan/Pembuatan Tanggul 433.562 m.	

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
7	Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air	Inventarisasi daerah irigasi, rawa, kewenangan provinsi serta SID untuk perencanaan dan perbaikan sumber daya air
8	Penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	8 (delapan) Kabupaten/Kota.
9	Rumah tangga pengguna air bersih	Peningkatan akses air minum perpipaan 4,0%.
10	Rumah layak huni	Terehabilitasinya rumah tidak layak huni 1500.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 5

Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan, sasaran pembangunan yang ingin dicapai diarahkan kepada sasaran utama, yakni :

Tabel 2.5
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Lima

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
1	Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1 Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target peningkatan produksi diarahkan kepada : a. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3.935.668 ton. b. Produktivitas Padi sebesar 50,5Kw/ha. c. Produksi jagung mencapai 1.697.315 ton.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
		<ul style="list-style-type: none"> d. Produktifitas jagung mencapai 58,2Kw/ha. e. Produksi kedelai mencapai 15.578 ton. f. Produktifitas kedelai mencapai 11,90Kw/Ha. g. Meningkatkan Produksi Hortikultura utama lokal lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - Sayuran sebesar 14,35 ton/ha - Buah-buahan sebesar 49,75 ton/ha - Tanaman Obat (Biofarma) sebesar 16.958 ton - Tanaman Hias Bunga Potong 17.824.231 potong - Tanaman Hias satuan produksi 154.122 pohon - Melat 28.270 kg h. Perbanyak Benih Tanaman Pangan 1,6 % i. Perbanyak Benih Hortikultura 1,6 % j. Kontribusi sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB 6,82 % k. Cakupan Bina Kelompok Petani 8,0 %
2		<p>Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas arealperkebunan rakyat di Sumatera Utara mencapai 1.102.461,67 hektar. b. Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 6.739.181,22 ton.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
			<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2,57 %. d. Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 1.500 Ha.
		3	<p>Sub-sektor Peternakan, dengan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi daging 153.239,65 Ton. b. Produksi Susu 983,42 Ton/Tahun. c. Produksi telur 151.161,63 Ton/Tahun. d. Jumlah Akseptor IB 67.441 ekor. e. Jumlah Kelahiran IB 48.558 ekor. f. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (ASUH). g. Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya.
		4	<p>Sub-sektor Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada terpenuhinya target :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi Perikanan Tangkap sebesar 477.293,8 ton. b. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 210.020 ton. c. Konsumsi ikan per kapita sebesar 42 kg/kapita/tahun. d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan 11,91(%). e. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 228,16 ton.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
			f. Ekspor hasil perikanan sebesar 61.662,7 ton.
2	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	1	<p>Ketersediaan pangan utama :</p> <p>a. Ketersediaan energi per kapita minimal 3.880 kilo kalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 77,38 gram/hari.</p> <p>b. Ketersediaan Cadangan Pangan sebesar 186 ton.</p> <p>c. Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 369 lumbung pangan.</p> <p>d. Kelompok Lumbung Pangan sebanyak 99 Gapoktan.</p>
		2	<p>Distribusi akses pangan :</p> <p>a. Sistem distribusi harga tercapai 100 %</p> <p>b. Akses pangan masyarakat 101 kelompok</p>
		3	<p>Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:</p> <p>a. Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% menjadi 124,82 Kg/Kapita/Tahun untuk memenuhi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2016 sebesar 85,8.</p> <p>b. Konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan energi, karbohidrat sebesar 2.200 Kilo kalori/hari dan protein sebesar 57,0 gr/kapita/hari.</p> <p>c. System penanganan keamanan pangan segar 80%.</p>

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
			d. Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota sebanyak 20 kelompok sayuran/buah.
		4	Penanganan kerawanan pangan : a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan minimal 8,91% pada tahun 2016. b. Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan pada 75 desa.
		5	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan
		6	Efektivitas koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan.
3	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor	Peningkatan ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), komoditi hortikultura (kentang, kubis, jeruk, pisang, nenas) rata-rata sebesar 5%.	
4	Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak, Pekebun dan Nelayan	1	Nilai Tukar Petani 102,99.
		2	NTP peternakan 108,30.
		3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB sebesar 20,20%.
5	Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis	1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 15.000 hektar.
		2	Berkurangnya Kerusakan Kawasan Hutan seluas 5.000 hektar menjadi 66.500 hektar.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 6

Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah, sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

Tabel 2.6
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Enam

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
1	Alokasi dana APBD untuk pengembangan penelitian terapan	1	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/ diseminasi TTG 3 kali.
		2	Jumlah pelaksanaan kajian TTG 9 kajian.
2	Riset dan pengembangan teknologi spesifik mendukung pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus	1	Jumlah kajian teknologi spesifik 7 kajian.
		2	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri dan Lembaga Riset lainnya.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 7

Peningkatan ekonomi kerakyatan, sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

Tabel 2.7
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Tujuh

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
1	Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.290.764 unit
2	Pertambahan jumlah KUKM yang mengakses sumber daya produktif	266 KUKM
3	Pertambahan jumlah UMKM yang memanfaatkan sertifikasi HaKI, IRT atau Halal	75 UKM
4	Pertumbuhan jumlah koperasi	12.529 unit

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
5	Pertambahan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	150 unit
6	Pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi	680 orang
7	Pertambahan jumlah Volume Usaha Koperasi	Rp. 365.741.381.462
8	Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata	1 3 Destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias dan Berastagi)
		2 100 orang tenaga terlatih pariwisata
9	Peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan minimal 10%
10	Kontribusi sub sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 2,31 %
11	Meningkatnya ratio elektrifikasi	92,72%
12	Jumlah daya listrik	3.300 MW

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 8

Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

Tabel 2.8
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Delapan

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
1	Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	Persentase Pengangguran Terbuka menjadi 5,41%.
2	Penurunan Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin menjadi 9,31%.

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
3	Penciptaan kesempatan kerja baru	1	Optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja untuk 100 sarjana belum bekerja.
		2	Mendorong penciptaan pengusaha pemula 12.000 pengusaha.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

Prioritas 9

Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah, sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

Tabel 2.9
Sasaran Utama dan Target Kinerja Prioritas Sembilan

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
1	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)	Penurunan tingkat kemiskinan koridor Sumatera yang menjadi <i>quick wins</i> pada lokasi yang akan di tentukan.	
2	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	1	Mendorong Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		2	Mendorong terfasilitasinya pembangunan di KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.
3	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs)		

NO	SASARAN UTAMA		TARGET KINERJA 2016	
	a	Tujuan (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan	1	Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari menjadi 8,75 pada tahun 2016 dan menurunkan Indeks kedalaman kemiskinan
			2	Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 80,18%
			3	Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, untuk pencapaian target 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 14.05%. • Prevalensi balita gizi buruk 21%. • Prevalensi balita gizi kurang 11,90%. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum : <ul style="list-style-type: none"> • 1.400 kkal/kapita/hari 8.50 % • 2.000 kkal/kapita/hari 35.32%
	b	Tujuan (2) mewujudkan pendidikan dasar	Target 2A : Menjamin pada 2016 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A sebesar 100% 	

NO	SASARAN UTAMA		TARGET KINERJA 2016
			<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI sebesar 100% • Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 98,8%
	c	Tujuan (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<p>Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi sebesar 100%. - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/ Paket A sebesar 100%. - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP sebesar 100%. - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 100%. - Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan Tinggi sebesar 100%. - Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100%. - Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 57%. - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD minimal sebesar 25%.
	d	Tujuan (4) Penurunan angka kematian anak	<p>Target 4 (a) Menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 2016, indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian anak di bawah lima tahun. • Tingkat kematian bayi.

NO	SASARAN UTAMA		TARGET KINERJA 2016	
			<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi. 	
	e	Tujuan (5) Meningkatkan kesehatan ibu	Menurunnya dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 2016. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Ratio kematian ibu • Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 	
	f	Tujuan (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	1	Pada tahun 2016 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. • Tingkat prevalensi kontrasepsi • Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS
			2	Tahun 2016 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya. Indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria. • Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC. • Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.
	g	Tujuan (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Target 7A : memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.	

NO	SASARAN UTAMA		TARGET KINERJA 2016	
			Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2016.	
	h	<p>Tujuan (8) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂)e • Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) • Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 	<p>Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasidasarhinggatahun2016,dengan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan. • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan. <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>	
4	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)		1	Terpenuhinya kebutuhan energi minimal 2.200 Kkal/kap/hari
			2	Terwujudnya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 18 %
			3	Terwujudnya penurunan prevalensi ukuran tubuh pendek balita menjadi 34%
			4	Terwujudnya penurunan daerah dengan kondisi rawan pangan menjadi 35 %
			5	Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian local

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016	
		6	Terwujudnya peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat
		7	Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat
		8	Terwujudnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		9	Terciptanya Kelembagaan Pangan dan Gizi yang kuat
5	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	Terlaksananya kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca.	
6	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	1	Terwujudnya penyempurnaan/Perbaikan Sistem Pelayanan Publik
		2	Terwujudnya perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Terwujudnya penataan/Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan
		4	Terwujudnya penetapan dan pembinaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
7	Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD – PUG)	Terbentuknya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG	
8	Mendukung sasaran pembangunan lainnya	1	Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

NO	SASARAN UTAMA	TARGET KINERJA 2016
		2 Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan
		3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antar pemerintah dengan daerah otonom, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta didasari oleh pertimbangan bahwa terdapat 5 urusan pemerintahan yang sepenuhnya harus menjadi kewenangan pemerintah, yaitu : Bidang Politik Luar Negeri, Bidang Pertahanan Keamanan, Bidang Yustisi, Bidang Moneter dan Bidang Agama.

Disamping itu pembagian urusan pemerintahan juga didasarkan atas adanya hubungan kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah sebagai satu sistem pemerintahan. Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan pelaksanaan asas desentralisasi pemerintahan pada masing-masing daerah, maka pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dijabarkan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunan sesuai potensi keunggulan dan kekhasan daerah.

B. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pendidikan

Hasil-hasil yang dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang Pendidikan pada tahun 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) :

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2015 sebesar 68,70% meningkat menjadi 73,18% pada tahun 2016.
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar/ Sederajat pada tahun 2015 dicapai 114,01 % menjadi 109,56 % pada tahun 2016.
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat pada tahun 2015 dicapai 102,98%, meningkat menjadi 104,29% pada tahun 2016.
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas/ Sederajat pada tahun 2015 dicapai 88,75%, meningkat menjadi 93,81% pada tahun 2016.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Sederajat tahun 2015 dicapai 92,21%, meningkat menjadi 94,41% pada tahun 2016.
- f. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat tahun 2015 dicapai 81,95% menjadi 76,81% pada tahun 2016.
- g. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat tahun 2015 dicapai 69,50% menjadi 67,92% pada tahun 2016.

**sumber : PDSPK Kemdikbud*

2) Jumlah siswa pada jenjang TK/KB/Penitipan Anak/SPS pada tahun 2015 sebanyak 849.109 orang, menjadi 922.568 orang pada tahun 2016 dengan rincian :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) = 282.941 orang
- b. Kelompok bermain (KB) = 262.496 orang

- c. Tempat Penitipan Anak (TPA) = 4.134 orang
- d. Satuan PAUD Sejenis (SPS) = 372.997 orang

3) Perkembangan Angka Putus Sekolah

- a. Angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2015 adalah sebanyak 13.499 siswa dan menjadi 7.621 siswa pada tahun 2016.
- b. Angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.709 siswa dan menjadi 4.119 siswa pada tahun 2016.
- c. Angka angka putus sekolah SMA/MA pada tahun 2015 adalah sebanyak 5.739 siswa dan menjadi 4.295 siswa pada tahun 2016.

4) Perkembangan Angka Kelulusan

- a. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebanyak 295.637 siswa dan menjadi 397.318 siswa pada tahun 2016.
- b. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2015 adalah sebanyak 212.574 siswa dan menjadi 210.676 siswa pada tahun 2016.
- c. Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 adalah sebanyak 227.815 siswa dan menjadi 177.569 siswa pada tahun 2016.

5) Perkembangan angka melanjutkan sekolah

Jumlah melanjutkan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebanyak 220.994 orang dan menjadi 227.480 orang pada tahun 2016.

6) Perkembangan angka melanjutkan sekolah

Jumlah melanjutkan SMP/MTs pada tahun 2015 adalah sebanyak 210.653 orang dan menjadi 230.038 orang pada tahun 2016.

- 7) Jumlah guru yang berijazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4 pada tahun 2015 sebanyak 182.418 guru dan tahun 2016 sebanyak 172.378 guru.
- 8) Perkembangan Pencapaian program wajib belajar 12 tahun 2016 : saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera melalui Dinas Pendidikan belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Wajib Belajar 12 Tahun, mengingat saat ini Peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai langkah awal dalam rangka implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, dimana PMU bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

- 9) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pelaksanaan pendidikan Standar Internasional dihapuskan. Sehingga capaian kinerjanya tidak ada lagi.
- 10) Angka melek huruf 15 tahun keatas pada tahun 2015 adalah 98,82 pada tahun 2016 angka melek huruf usia 25 tahun kebawah 99,52. (sumber : BPS Provsu dan Susenas 2016).

11) Penyandang Ketunaan

- a. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2015 adalah 3.634 orang menjadi 3.762 orang pada tahun 2016.
- b. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTs tahun 2015 adalah 487 orang menjadi 630 orang pada tahun 2016.
- c. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2015 adalah 107 orang menjadi 184 orang pada tahun 2016.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Saat ini derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator capaian kinerja bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Jumlah Kematian Bayi (AKB)

AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan angka BPS, AKB mampu diturunkan dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 25,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Berdasarkan trend penurunan yang terjadi kurun waktu 2001-2010, dimana penurunan terjadi sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2015 yaitu 19 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 17,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2016 jumlah bayi yang

meninggal adalah sebanyak 1.069 bayi dari 303.230 sasaran lahir hidup.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. AKI tahun 2015 dan 2016, masih mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 yakni 268/100.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2016 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah sebanyak 231 orang dari 303.230 sasaran lahir hidup.

3) Umur Harapan Hidup (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa UHH penduduk Sumatera Utara tahun 2016 adalah 68,29 tahun, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yakni 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 68,21 tahun pada tahun 2015.

4) Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Pada tahun 2016, dilakukan Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) di 33 kabupaten/kota dan diketahui bahwa prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk mencapai 11,4%. Jika dibandingkan dengan capaian prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk tahun 2015 yakni 21,3%, maka terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2016.

5) Ketersediaan Sarana Kesehatan

Pada tahun 2015 telah tersedia 571 unit puskesmas, dengan perincian 176 unit puskesmas rawat inap dan 395 unit puskesmas non perawatan; dan pada tahun 2016 puskesmas yang tersedia sebanyak 571 unit terdiri 174 unit puskesmas rawat inap dan 397 unit puskesmas non perawatan; puskesmas pembantu sebanyak 2.085 unit dan 522 unit puskesmas keliling yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian setiap 100.000 penduduk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata dilayani oleh 4 puskesmas atau satu puskesmas melayani 23.379 jiwa penduduk dan satu puskesmas pembantu telah melayani 3-4 desa.

Selain jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) yang tetap, pada tahun 2015 dan 2016 jumlah sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) juga tetap, yakni 210 unit Rumah Sakit (RS).

6) Ketersediaan Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah pada tahun 2016 masih memakai data tahun 2015 yaitu antara lain :

- a. Jumlah tenaga dokter spesialis yaitu 2.614 orang;
- b. Jumlah tenaga dokter umum yaitu 2728 orang;
- c. Jumlah tenaga dokter gigi yaitu 817 orang;
- d. Jumlah tenaga perawat yaitu 16.612 orang;
- e. Jumlah tenaga bidan yaitu 16.125 orang.

7) Ketersediaan Obat dan Vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin mengalami penurunan sebesar 0,84% yaitu dari 79,43% pada tahun 2015 menjadi 78,59% pada tahun 2016.

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pada tahun 2016 jumlah penduduk yang miskin yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS adalah sebanyak 5.206.028 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu 5.075.576 jiwa. Seluruh penduduk yang miskin yang tercatat sebagai PBI (100%) mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di rumah sakit.

9) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2015 terdapat 48 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan 44 desa (91,6%) dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Pada tahun 2016 terdapat 37 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan 34 desa/kelurahan (91,9%) dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam oleh Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

10) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 28,7% pada tahun 2015 sebesar menjadi 30,01% pada tahun 2016.

- 11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 100%.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Di bidang lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu antara lain melalui penanganan pencemaran udara, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, tempat pembuangan sampah persatuan penduduk di berbagai daerah, penegakan hukum mengenai lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan dilakukan melalui pengendalian sumber-sumber pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dengan uraian sasaran adanya penanganan pencemaran udara yaitu 0% penurunan beban pencemar parameter kunci air permukaan *Biological Oxygen Demand* (BOD), 0% *Chemical Oxygen Demand* (COD), 0% penurunan beban pencemar parameter kunci udara ambient *Sulfur Dioksida* (SO₂), *Carbon Monoksida* (CO) dan *Nitrogen Dioksida* (NO₂), pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, adanya tempat pembuangan sampah di berbagai kabupaten/kota dan penegakkan hukum/peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan.

Mengenai permasalahan pencemaran seperti sampah dikarenakan penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh Kabupaten/Kota, dimana amanah dari Undang-undang tersebut harus menerapkan *Sanitary Landfill* (metode pengurugan sampah

yang dioperasikan secara sistematis). Untuk itu Pemerintah Sumatera Utara telah membangun beberapa TPA antara lain di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Kota Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.

Peningkatan capaian kinerja di bidang lingkungan hidup pada tahun 2015 dan 2016, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penanganan pencemaran udara mengenai status mutu udara ambient (pencemaran udara), dari target capaian tahun 2015 sebanyak 4 kabupaten/kota yakni : Medan, Karo, Deli Serdang dan Binjai. Pada tahun 2016 status mutu udara ambient yang diinformasikan sebanyak 4 kabupaten/kota yakni Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo.
- 2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dari target capaian tahun 2015, perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 17 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provsu tahun 2015 juga sebanyak 17 dokumen. Dimana 8 dokumen sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan 9 dokumen dalam proses pembahasan untuk dikeluarkan SKKL. Untuk target capaian tahun 2016, perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 16 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 juga sebanyak 16 dokumen.

- 3) Kabupaten yang menyediakan tempat pembuangan sampah tahun 2015 sebanyak 1.746 unit, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 200 unit, Kabupaten Batu Bara sebanyak 30 unit, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 120 unit, Kabupaten Nias Utara sebanyak 166 unit, Kabupaten Karo sebanyak 200 unit, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 430 unit, Pemerintah kota Sibolga sebanyak 600 unit. Sementara untuk data 2016 belum dapat diperoleh.
- 4) Penegakan Hukum Lingkungan, pengaduan yang diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Provsu pada tahun 2015 sebanyak 27 kasus, 2 kasus telah masuk ke pengadilan serta 25 kasus sedang dalam tahap verifikasi dan penyidikan. Sementara pada Tahun 2016 kasus yang diterima sebanyak 62 kasus, diantaranya 26 kasus sedang dalam proses verifikasi sedangkan 26 kasus lagi tidak selesai dikarenakan terdapat banyak kendala/masalah.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sepanjang 38.715,044 Km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2.249,644 Km, jalan provinsi sepanjang 3.048,500 Km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 33.452,900 Km. Pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 76,11 %.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi menargetkan jalan mantap 95 % pada tahun 2018 untuk jalan Nasional dan jalan Provinsi serta 70 % untuk jalan Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan Provinsi

sepanjang 127,40 Km, dari target 338,50 km dalam target RPJMD. Pemeliharaan berkala jalan sepanjang 31,20 Km serta pembangunan/ penggantian Jembatan dengan total panjang 375 M.

Kondisi kemantapan jalan Provinsi pada tahun 2015 sebesar 76,11% meningkat menjadi 80,83% pada tahun 2016, dengan rincian panjang jalan mantap (baik dan sedang) pada tahun 2015 sepanjang 2.320,20 Km meningkat menjadi 2.464,20 Km pada tahun 2016. Kondisi jalan rusak pada tahun 2015 sebesar 23,89% pada tahun 2015 menurun menjadi 19,17% pada tahun 2016, dengan rincian panjang jalan rusak (rusak ringan dan rusak berat) pada tahun 2015 sepanjang 728,30 Km menurun menjadi 584,30 Km pada tahun 2016.

Selain itu, pada tahun 2015 ada 19 ruas jalan Provinsi yang diusulkan perubahan fungsi dan statusnya menjadi jalan Nasional sepanjang 360.07 Km dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015, sehingga sejak tahun 2016 panjang jalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.632,22 Km dari semula sepanjang 2.249,64 yang penanganannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan panjang jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.688,43 Km yang sebelumnya 3.048,50 Km.

Luas baku irigasi dan rawa di Provinsi Sumatera Utara seluas 1.430.595 Ha yang meliputi lahan irigasi seluas 418.590 Ha dan lahan rawa seluas 1.012.005 Ha. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola daerah

irigasi dan rawa yang sudah terbangun seluas 113.845 Ha dengan jaringan irigasi seluas 86.999 Ha, dan jaringan rawa seluas 26.846 Ha.

Target dan realiasi tingkat capaian kinerja atas sasaran strategis dari program pokok (program pembangunan) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2016

No	INDIKATOR	Realisasi 2015	Realisasi 2016
1	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)	64,90%	74,50%
2	Optimalisasi Jaringan Rawa (%)	43,01%	44,39%
3	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk/Embung/ Situ-situ (bh)	23 Buah	36 Buah
4	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan berkurangnya luasan genangan banjir (%)	79,95%	81,80%
5	Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi dan wadiah lainnya (%/Dok/Keg)	72% 63 Dokumen 38 Kegiatan	78% 72 Dokumen 39 Kegiatan
6	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut (%/Dokumen, Laporan UPT per Tahun)	72% 37 Dokumen 10 Laporan	72% 47 Dokumen 10 Laporan

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu

Setiap tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembangunan saluran drainase di kawasan permukiman, untuk operasional dan pemeliharannya dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota. Tahun 2014 dibangun drainase sepanjang 24.955 meter, tahun 2015 sepanjang 11.159 meter dan tahun 2016 dilakukan pembangunan drainase sepanjang 26.230 Meter. Hasil pembangunan drainase tahun 2016 menambah jumlah drainase dengan kondisi baik menjadi 248.535 meter atau 62,74 % dari target kinerja.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2016

No	Indikator	TargetTahun 2016	RealisasiKinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan pelayan air limbah perpipaan	30.150 KK	23.982 KK	79,54 %
2	Jaringan drainase dengan kondisi baik	396.166 Meter	248.535 Meter	62,74 %

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provsu

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Penyusunan profil Ruang Terbuka Hijau telah dilakukan pada kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Padangsidimpuan, Sibolga, Tebing Tinggi, Rantau Prapat dan Kisaran. Pada 9 kawasan tersebut luas Ruang Terbuka Hijau adalah 9%.

Target luas ruang terbuka hijau tersebut belum dapat dicapai karena belum tersedia kegiatan untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau sebagai prasarana sarana permukiman perkotaan merupakan standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota, peran pemerintah provinsi terbatas pada fungsi koordinasi dan pembinaan.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3) Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
- 5) Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses DPRD tahun 2015 dan 2016. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
- 4) Revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis.
- 5) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- 6) Peningkatan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi.
- 7) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

7. Urusan Wajib Perumahan

Luas kawasan kumuh pada awal Renstra adalah 1.792 Ha, target luas kawasan kumuh pada tahun 2016 adalah 1.192 Ha atau setara dengan pengurangan 600 Ha, kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan melakukan pembangunan/penataan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun adalah 200 Ha, luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2014 adalah 166 Ha, tahun 2015 sebesar 49,52 ha dan tahun 2016 sebesar 95,10 ha, sehingga total penanganan selama tahun 2014 s/d 2016 adalah 310,62 Ha.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan 2 pola. Pola pertama kerja sama dengan TNI sebagai pelaksana rehabilitasi rumah. Pola ini telah berjalan sejak tahun 2012 dengan jumlah rumah telah direhab sebanyak 4.825 unit. Pola kedua adalah dengan melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah pada peringatan Hari Keluarga Nasional. Dengan pola ini dilakukan rehab rumah 45 unit tahun 2015, 25 Unit tahun 2016.

8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja di bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2015	2016
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dalam rangka profesionalisme kepemudaan untuk mendukung pembangunan kepemudaan di Provinsi Sumatera Utara	1 Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)	72	72
		2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan	10	12
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan keolahragaan dan prestasi Olahraga ditingkat regional, nasional maupun international	1 Jumlah Organisasi Olahraga (Organisasi)	49	49
		2 Jumlah Pelaksanaan kegiatan Olahraga	10	10
3	Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Keolahragaan	1 Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) unit	4	4
		2 Jumlah lapangan/arena Olahraga (Unit)	70	75

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provsu

Prestasi yang dicapai pada tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- 1) Juara 2 tingkat Nasional Pemuda Mandiri Berprestasi se Indonesiaan. Muhammad Jak'far Hasibuan dalam membangun sikap gotong royong dan menghidupkan kembali soko guru perekonomian melalui koperasi terasi silo laut.

- 2) Bidang Peloporan Pemuda terseleksi enam orang pemuda tingkat provinsi Sumatera Utara.
- a. Rosnila Sinaga asal Tapanuli Selatan bidang kepeloporan sosial budaya dan pariwisata, melestarikan etnik kain tenun khas Tapanuli Selatan di tengah - tengah serbuan berbagai jenis busana modern.
 - b. Syafril asal Tebing Tinggi bidang kepeloporan sosial budaya dan pariwisata, melestarikan etnik budaya khas Melayu dari berbagai perkembangan musik modern.
 - c. Laposa Mirta Dearoja asal Serdang Bedagai bidang kepeloporan sosial budaya, pariwisata dan bela Negara, melestarikan etnik budaya khas Melayu dari berbagai perkembangan musik modern.
 - d. Sandro Sihotang asal Humbahas bidang kepeloporan pendidikan membangun kreativitas pemuda melalui pendidikan mingguan dan melibatkan unsur organisasi kepemudaan dan masyarakat.
 - e. Muhammad Naim Nasution asal Pematangsiantar bidang kepeloporan pangan mengajak pemuda di lingkungan untuk lebih memanfaatkan potensi lokal berupa tanaman ubi di jadikan makanan ringan (kerupuk).
 - f. Yohannes Kristanto bidang kepeloporan sumber daya alam dengan meningkatkan hasil limbah kotoran sapi dan sampah organik menjadi pupuk untuk pertanian jeruk dan kopi. Pemuda pelopor asal Tapanuli Utara ini dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jogjakarta tetapi tidak berhasil memperoleh juara.
- 3) Seleksi Petukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) telah mengutus :
- a. Arif Wardiman Lase pertukaran pemuda Indonesia – Jepang;

- b. Muhammad Rizki Azhari Nasution pertukaran pemuda Indonesia – Tiongkok;
 - c. Sarah Yosephin Hutabarak pertukaran pemuda Indonesia – Korea Selatan;
 - d. Carla Marsya pertukaran pemuda Indonesia – India;
 - e. PPAN ini mempunyai misi meningkatnya pemahaman dan pertukaran budaya serta home industri kedua peserta dari negara tujuan masing-masing. Kegiatan berlangsung selama 2 minggu kecuali Indonesia – India berlangsung selama 1 bulan.
- 4) Mengutus peserta Paskibraka tingkat Nasional an. Fitri Fauziah asal SMA Negeri 2 Rantau Prapat, Labuhanbatu dan Arsy Ardan Lubis asal SMA Negeri 2 Tanjungbalai.
 - 5) Mengutus 3 orang peserta untuk mengikuti Kapal Pemuda Nusantara (KPN) atas nama Zul Ichsan Azdian, M. Azmi Mutohari Nasution, dan Anggi Dwi Putri dengan tujuan Jakarta – Dabo – Singkep – PulauBintan – Tarenpa – Pulau Laut – Pontianak – Karimata – Jakarta, kegiatan di kapal pesiar ini berlangsung selama 10 minggu dengan aneka aktivitas seperti diskusi tentang narkoba, kenakalan remaja, dan perilaku negative lainnya.
 - 6) Upaya menambah lebih banyak lagi Pemuda Sumatera Utara meraih predikat Juara I Nasional Pemuda Pelopor dengan melakukan pembinaan kepemudaan melalui program/kegiatan pemilihan kepeloporan pemuda pada setiap tahun dilaksanakan secara berkesinambungan dan terarah diantaranya untuk tahun 2016 antara lain :
 - a. Kepeloporan Bidang Pangan.
 - b. Kepeloporan Bidang Pendidikan.
 - c. Kepeloporan Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara.

- 7) Upaya menumbuhkembangkan wirausaha pemuda pemula, telah dilaksanakan program/kegiatan lomba wirausaha pemuda pemula dari berbagai komunitas yang berlatarbelakang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi melalui wirausaha muda berprestasi berjumlah 21 orang. Untuk memberikan semangat dan kesempatan kepada pemuda bidang peningkatan skill, telah dilaksanakan kegiatan keterampilan bidang otomotif, salon kecantikan dan jahit menjahit sebanyak 110 orang peserta, dan melalui Program Peningkatan Kewirausahaan Pemuda akan dilaksanakan pemberdayaan pemuda melalui kegiatan pelatihan *entrepreneurship* dari kabupaten/kota sebanyak 100 orang usia 18 – 30 Tahun.
- 8) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memberikan penguatan dalam bidang kewirausahaan, dengan membentuk forum kewirausahaan pemuda sebagai tempat terhimpunnya para pemuda yang berlatarbelakang jiwa kewirausahaan dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi ekonomi serta kewirausahaan.
- 9) Sosialisasi pengembangan olahraga massal di kabupaten/kota melalui majalah olahraga yang diterbitkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga setiap bulannya.
- 10) Atlet PPLP Provinsi Sumatera Utara sudah menunjukkan potensi yang luar biasa di tingkat Nasional, terbukti 2 atlet Atletik PPLP terpanggil mengikuti Pelatnas PB PASI di Jakarta dan untuk mewakili Indonesia pada *Asean School Vietnam* tahun 2016 dengan memperoleh medali perak.
- 11) Meningkatnya prestasi atlet SSB Disporasu ditunjukkan salah satu atlet SSB Disporasu lolos mengikuti seleksi masuk atlet sebagai atlet Sepak Bola PPLP Provinsi Sumatera Utara.

- 12) Mempertahankan juara I ke 3 kalinya pada kejuaraan Dragon Boat Piala Raja Thailand di Sungai Bang Nara, Muang Distric tanggal 21 s.d 25 September 2016 Provinsi Narathiwat Thailand Selatan Hatrick.
- 13) Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Tinju yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 s.d 21 Juli 2016 memperoleh 4 Medali perunggu.
- 14) Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Judo yang berlangsung di Padang pada tanggal 1 s.d 5 Agustus 2016 memperoleh 2 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu.
- 15) Kejurnas PPLP Atletik di Jakarta yang berlangsung dari tanggal 3 s.d 7 Agustus 2016 memperoleh 2 Medali Emas dan 2 Medali Perak.
- 16) Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Pencak Silat yang berlangsung di Sulawesi Utara dari tanggal 11 s.d 15 Oktober 2016 memperoleh 1 Medali Perunggu.
- 17) Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Gulat yang berlangsung di Surabaya tanggal 18 s.d 20 Oktober 2016 memperoleh 1 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu.
- 18) Kejurnas Karate antara PPLP berlangsung di Gorontalo dari tanggal 19 s.d 23 Oktober 2016 memperoleh 2 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.
- 19) Pospenas berlangsung di Provinsi Banten dari tanggal 22 s.d 28 Oktober 2016 dengan memperoleh 3 Medali Emas, 8 Medali Perak dan 8 Medali Perunggu menduduki peringkat 8 besar Nasional.
- 20) Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Sepak Bola yang berlangsung di Maluku pada tanggal 3 s.d 9 November 2016 memperoleh Medali Perunggu.

- 21) Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Angkat Besi yang berlangsung di Bengkulu pada tanggal 10 s.d 14 November 2016 memperoleh 3 Medali Emas dan 2 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.
- 22) POPWIL berlangsung di Pekanbaru Riau dari tanggal 13 s.d 20 November 2016 dengan memperoleh 4 Medali Emas, 8 Medali Perak, dan 10 Medali Perunggu menduduki peringkat 3 besar.
- 23) Pada tanggal 31 Desember 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan MoU dengan Rektor Universitas Panca Budi dan Ketua Yayasan Graha Eka Education Centre dalam rangka pemberian beasiswa bagi atlet olahraga berprestasi.

9. Urusan Wajib Penanaman Modal

Capaian kinerja di bidang penanaman modal pada tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai sebesar Rp. 19,39 Triliun atau 162%, dimana indikator kinerjanya adalah Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Sumatera Utara tahun 2016 dengan target sebesar Rp. 12 Triliun.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 dan 2016

No	Tahun	Target (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	Capaian %
1	2015	11.000.000,00	19.863.619,80	181%
2	2016	12.000.000,00	19.393.252,09	162%

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Pencapaian target kinerja di bidang penanaman modal tidak terlepas dari pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Provinsi Sumatera Utara, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (<i>proyek</i>)	126	916	727 %
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (<i>Rp. triliun</i>)	12,00	19,39	162 %
3	Rasio daya serap tenaga kerja (tenaga kerja Indonesia)	113	116	103 %
4	Kenaikan/penurunan nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA (%)	45	43	95 %
5	Lamanya Proses Perizinan (<i>hari kerja</i>)	5	1	100 %

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2015 dan 2016

No	Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Tenaga Kerja	
				INA	Asing
PMDN					
1	2015	96	4.287.417,30	13.684	217
2	2016	228	4.954.829,29	7.389	4
PMA					
1	2015	204	15.576.202,50	12.013	149
2	2016	688	14.435.422,80	7.208	145

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Jumlah proyek baik PMDN maupun PMA pada tahun 2016 terlihat peningkatannya sangat drastis bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan masih tingginya minat investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara dan dapat juga

dikatakan bahwa hasil-hasil produk PMDN dan PMA di Sumatera Utara mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Realisasi investasi PMDN di Sumatera Utara pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 13% bila dibandingkan dengan tahun 2015, hal ini dapat dikatakan bahwa iklim investasi di Sumatera Utara telah mulai kondusif, walaupun realisasi investasi PMA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun sebesar -8%. Dan untuk akumulasi jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2016 juga menurun sebesar -2%, hal ini masih dianggap wajar bila dilihat dari perlambatan ekonomi global hampir diseluruh negara maju di dunia.

Capaian realisasi investasi PMDN dan PMA di Sumatera Utara Tahun 2016 telah melebihi dari target pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai 162% atau sebesar Rp. 19,39 Triliun dimana target pada tahun 2016 sebesar Rp. 12,00 Triliun.

Pada tahun 2016 jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 1.011 ijin yang dari 41 jenis ijin.

10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara periode tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan sebesar 10,94%, demikian juga dengan jumlah koperasi aktif yang mengalami penurunan sebesar 11,57% dan koperasi tidak aktif yang menurun 6,02%. Jumlah anggota koperasi menunjukkan penurunan sebesar 14,77%. Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat sebesar 98,67%. Jumlah tenaga kerja di bidang koperasi manajer mengalami peningkatan sebesar 21,23% dan karyawan mengalami penurunan 18,96%.

Tabel 3.7
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian	Keadaan	
		2015	2016
1	Jumlah Koperasi	11.755	10.648
	Aktif (Unit)	6.825	6.035
	Tidak Aktif (Unit)	4.930	4.613
2	Anggota (Orang)	1.818.568	722.334
3	RAT (Unit)	227	451
4	Manajer (Orang)	146	177
5	Karyawan (Orang)	6.559	5.315
6	Modal Sendiri (Rp. 000)	21.230.966.062	2.828.988.893
7	Modal Luar (Rp. 000)	1.191.175.509	1.640.944.961
8	Volume Usaha (Rp. 000)	4.934.083.624	3.610.002.041
9	SHU (Rp. 000)	593.676.669	186.102.532

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Modal sendiri juga mengalami penurunan, dimana modal sendiri menurun sebesar 86,67% demikian juga modal luar meningkat sebesar 37,73%. Sementara itu transaksi usaha koperasi menunjukkan penurunan dimana nilai volume usaha menurun sebesar 26,83% dan sisa hasil usaha (SHU) menunjukkan peningkatan sebesar 68,65%.

Jumlah usaha kecil menengah di Sumatera Utara pada tahun 2015 sebanyak 2.855.549 bertambah menjadi 2.855.847 pada tahun 2016, atau meningkat 0,01%. Hal ini merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaanya merupakan persemaian usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan. Banyak usaha kecil menengah yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya. Namun dibalik peningkatan kuantitas usaha kecil menengah tersebut, masih banyak masalah dan tantangan yang

dihadapi. Usaha kecil menengah juga masih didominasi oleh pelaku usaha yang terbatas kemampuannya sehingga secara umum UKM belum memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi. Tantangan eksternal juga semakin besar, yang diwarnai dengan keterbukaan pasar yang meningkatkan intensitas persaingan diantara pelaku usaha.

11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sampai Semester II Tahun 2016 sebanyak 14.682.260 Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 7.404.899 Jiwa dan Perempuan sebanyak 7.277.361 Jiwa. Data jumlah penduduk tersebut diperoleh dari Database Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dimana Permendagri ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya penerbitan KTP-el bagi penduduk yang diluar domisili.

Adapun tujuan dari perekaman dan penerbitan KTP elektronik bagi penduduk diluar domisili bertujuan untuk mempercepat kepemilikan KTP elektronik bagi seluruh wajib KTP elektronik. Dalam perekaman dan penerbitan KTP elektronik penduduk di luar domisilinya, instansi pelaksana dilarang melakukan

perubahan data kependudukan. Adapun persyaratan nya sebagai berikut :

- 1) Penduduk dapat melakukan perekaman dan penerbitan KTP elektronik di Instansi Pelaksana di luar domisili, dengan persyaratan :
 - a. Mengisi formulir permohonan perekaman dan penerbitan KTP elektronik ke Instansi Pelaksana di luar domisili; dan
 - b. Melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan.
- 2) Penerbitan KTP elektronik bagi penduduk di luar domisili, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Telah melakukan perekaman data;
 - b. Kehilangan KTP elektronik di luar domisili; dan
 - c. Rusak KTP elektronik di luar domisili.

Rekapitulasi pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP elektronik kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Januari 2017.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik
Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Januari 2017

No	Kabupaten/Kota	Wajib KTP	Yg Telah Merekam	Yg Sudah Cetak
1	Tapanuli Tengah	236.931	191.806	176.000
2	Tapanuli Utara	224.521	183.174	152.935
3	Tapanuli Selatan	202.881	171.274	164.836
4	Nias	98.863	82.667	65.952
5	Langkat	848.116	674.631	95.658
6	Karo	267.880	252.870	40.341
7	Deli Serdang	1.318.801	1.055.054	212.825
8	Simalungun	867.527	540.287	56.924
9	Asahan	495.622	485.737	4.666
10	Labuhanbatu	342.768	257.494	53.127

No	Kabupaten/Kota	Wajib KTP	Yg Telah Merekam	Yg Sudah Cetak
11	Dairi	228.946	168.244	168.244
12	Toba Samosir	166.554	105.285	12.294
13	Mandailing Natal	313.417	212.757	2.412
14	Nias Selatan	228.576	100.285	2.938
15	Pakpak Bharat	36.253	25.014	-
16	Humbang Hasundutan	129.157	111.018	109.592
17	Samosir	99.045	79.073	2.196
18	Serdang Bedagai	451.972	441.689	349.258
19	Batu Bara	275.146	221.311	30.421
20	Padang Lawas Utara	176.881	126.567	16.165
21	Padang Lawas	165.344	124.527	18.381
22	Labuhanbatu Selatan	210.375	169.856	163.424
23	Labuhanbatu Utara	273.937	192.948	32.261
24	Nias Utara	92.714	58.210	13.058
25	Nias Barat	62.302	41.126	11.877
26	Kota Medan	1.824.686	1.549.915	146.408
27	Kota Pematangsiantar	211.229	202.387	38.829
28	Kota Sibolga	65.637	56.978	875
29	Kota Tanjungbalai	126.381	96.230	93.926
30	Kota Binjai	202.834	186.188	17
31	Kota Tebing Tinggi	123.290	111.066	22.447
32	Kota Padangsidempuan	156.484	116.412	19.119
33	Kota Gunungsitoli	99.627	80.610	18.555
JUMLAH		10.624.697	8.472.690	2.295.961

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerbitan KTP elektronik adalah ketiadaan blangko KTP elektronik terhitung tanggal 1 Oktober 2016 (pengadaan blangko KTP elektronik oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Untuk mengatasi kendala dimaksud, melalui surat Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 2 September 2016 menginstruksikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai pengganti KTP elektronik

menerbitkan surat keterangan. Surat keterangan dapat diberikan kepada penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terekam dalam database kependudukan kabupaten/kota.

Selanjutnya surat keterangan tersebut dapat dipergunakan antara lain Pemilu/Pilkada, Perbankan, Kepolisian, Asuransi, Imigrasi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, kabupaten/kota yang ditunjuk untuk melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Sibolga. Penetapan kabupaten/kota dimaksud didasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112/DUKCAPIL Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerbitan dilakukan di 33 provinsi, dan masing-masing Provinsi diwakili oleh sekurang-kurangnya 1 kabupaten/kota yang cakupan akta kelahirannya tertinggi di provinsi tersebut.
- b. Kabupaten/Kota tersebut telah memiliki cakupan akta kelahiran lebih dari 83% dengan menggunakan aplikasi SIAK.
- c. Dalam hal cakupan akta kelahiran di kabupaten/kota tidak mencapai angka 83% sebagaimana huruf b, ditetapkan berdasarkan angka cakupan tertinggi prosentase akta kelahiran dengan menggunakan aplikasi SIAK.

12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Capaian kinerja di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- 1) Jumlah angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 6.391.565 orang, menjadi 5.998.632 orang pada tahun 2016.
- 2) Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 67,28%, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 69,12%.
- 3) Jumlah angkatan kerja kategori kerja pada tahun 2015 adalah 5.960.202 jiwa dan pada tahun 2016 adalah 5.990.202 jiwa.
- 4) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.961.354,69,- untuk tahun 2017 setelah melakukan survey kebutuhan hidup layak.
- 5) Dalam rangka menekan angka pengangguran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan keterampilan tenaga kerja non institusional, yang dilaksanakan di UPT BLK Pematangsiantar terhadap 128 orang. Outcome dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kerja berbasis masyarakat yang diharapkan dapat membuka usaha sendiri.
 - b. Pelatihan kewirausahaan produktif, yang dilaksanakan di Kabupaten Karo, Humbang Hasundutan dan Kota Medan dengan jumlah peserta 200 orang. Outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya wirausaha baru yang mandiri sehingga angka pengangguran dapat dikurangi.
 - c. Padat karya infrastruktur, yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Toba Samosir. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

meningkatnya produktivitas tenaga kerja sebanyak 540 orang dan terlaksananya pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian daerah tersebut.

- d. Penanganan kasus ketenagakerjaan yang dilaksanakan diseluruh Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menekan angka kasus perselisihan ketenagakerjaan sehingga tercipta kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yang kondusif.
- 6) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh penghargaan bidang ketenagakerjaan yaitu :
 - a. Pembina K3 terbaik ke-2 Nasional oleh Menteri Tenaga Kerja.
 - b. Penghargaan Produktivitas Paramakarya (Pembinaan Perusahaan Kecil Menengah) oleh Menteri Tenaga Kerja yang diserahkan oleh Presiden RI kepada Gubernur Sumatera Utara.

13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Secara umum, kondisi ketahanan pangan Sumatera Utara tahun 2015 – 2016 cenderung semakin membaik dan kondusif, ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami kenaikan dari 2.526.194 ton tahun 2015, menjadi 2.764.719 ton tahun 2016 (ARAM II) terjadi kenaikan produksi sebesar 238.525 ton, tetapi bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2016 sebesar 1.739.437,066 ton, masih terdapat surplus sebesar 1.025.281,934 ton. Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, sebaiknya dikondisikan stock pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 bulan kebutuhan pangan penduduk, Jumlah beras yang dibutuhkan Sumatera Utara Tahun 2016 untuk konsumsi penduduk sebesar 14.631.902 jiwa sebanyak 152.171,78 ton

per bulan, dengan demikian posisi Sumatera Utara termasuk daerah Surplus beras.

Produksi beras di Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan, disisi lain kebutuhan konsumsi mengalami penurunan, sehingga Sumatera Utara mengalami surplus. Perkembangan produksi di Sumatera Utara sangat signifikan didukung adanya program pemerintah yang dikenal dengan Pajale (peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai).

Tabel 3.9
Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras
di Sumatera Utara Tahun 2014 – 2016

Tahun	Produksi	Konsumsi	Surplus
2014	2.338.477	1.870.363,00	424.833,00
2015	2.526.194	1.843.194,23	620.533,77
2016	2.764.719	1.739.437,00	1.025.281,00

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

Pengisian lumbung pangan rata – rata 2,5 – 5,8 ton gabah kering giling per unit lumbung. Pembangunan fisik lumbung bervariasi, dari sharing APBD Perintah Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBD Provinsi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan : (1) tersedia cadangan pangan daerah dan terpenuhinya cadangan pangan bagi petani/anggota kelompok, (2) terjadinya akumulasi modal usaha kelompok sebagai pendorong ekonomi perdesaan yang berorientasi kemitraan usaha antar kelompok dan mitra usaha lainnya dan (3) terjadi perubahan perilaku anggota kelompok/petani yang selama ini langsung menjual hasil panennya ke pedagang, menjadi budaya menyimpan atau menunggu menjual padinya pada saat harga gabah naik.

Tabel 3.10
Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2016

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Keterangan
1	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	49 unit (150 Ton)	23 unit (47,14 ton)	Cadangan pangan tersedia 31% dibanding tahun 2015, anggaran tersedia hanya mengisi 13 lumbung.
2	Cadangan Pangan Pemerintah (BULOG Divre Sumut)	5.038.786,32 Kg	66.027.110 kg	Cadangan pangan stock untuk operasi pasar dan Raskin.

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2015 dan tahun 2016 tidak tersedia, tetapi Stock beras sebagai cadangan pangan sebanyak 200 ton beras tersedia sepanjang tahun pada Gudang Bulog dan dapat digunakan dan dikeluarkan jika memenuhi administratif. Total ketersediaan beras untuk Sumatera Utara tahun 2016 ada sebanyak 2.830.793,14 Ton atau setara dengan 193,46 Kg/kap/tahun.

Beberapa produksi komoditas penting mengalami pertumbuhan positif, produksi jagung mengalami kenaikan dari 1.519.407 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.558.141 (ARAM II) tahun 2016, produksi kedele produksi tahun 2015 sebesar 6.549 ton, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 5.243 ton (ARAM II). Luas panen kedele mengalami penurunan dari 5.303 ha tahun 2015 menjadi 4.136 Ha tahun 2016.

Progres/perkembangan swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2015 – 2016 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dari hasil perimbangan swasembada beras tahun 2016 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 158,94% yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 58,94%, hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (padi, jagung, kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara.

Ketersediaan beras sebesar 193,46 Kg/Kapita/Tahun, bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 124,80 Kg/Kapita/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras untuk Sumatera Utara sangat surplus. Di sisi lain Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalan potensi pangan lokal dan penggalan kearifan lokal.

Tabel 3.11
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras
di Sumatera Utara Tahun 2015 – 2016

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016
Jumlah Penduduk (jiwa)	14.591.468	14.631.902
Kebutuhan Beras (ton)	1.843.194	1.739.437
Produksi Beras (ton)	2.526.194	2.764.719
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	620.534	1.025.282
% SSB	133,67	158,94

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

Program diversifikasi pangan di Sumatera Utara diwujudkan melalui Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP), yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai aktifitas dalam mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan pendekatan :

- 1) Pemberdayaan kelompok wanita tani/Dasa wisma;
- 2) Pengembangan pangan lokal;
- 3) Sosialisasi dan Promosi pada Perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS);
- 4) Lomba cipta pangan yang berbasis pangan local yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
- 5) Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
- 6) Pengembangan pangan pokok lokal melalui pemanfaatan potensi pangan lokal Kunjungan ke daerah lain yang telah berhasil mempromosikan pangan alternatif karbohidrat selain beras.

Selain itu dilakukan juga analisis pola konsumsi dan keamanan pangan sesuai kebutuhan daerah untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk yang sesuai dengan pola pangan harapan. Konsumsi energi aktual penduduk Sumatera Utara Tahun 2016 sebesar 2.005 Kkal/Kap/hari meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 1999 k.kal/kap/hr, konsumsi protein sebesar 64,0 gr/kap/hari naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 59,3 gr/kap/hr. Skor PPH mengalami peningkatan dari tahun 2015 (85,2) menjadi 85,7 di tahun 2016.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2016, dijelaskan sebagai berikut :

1) Penyelesaian kasus trafficking

Penyelesaian kasus trafficking (tindak pidana perdagangan orang) berdasarkan data dari Renakta IV Ditreskrimum Poldasu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Penyelesaian Kasus Trafficking

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Lidik	-	14	-
2	Sidik	8	-	61
3	Tahap I	-	-	-
4	P19	-	-	-
5	P21	-	-	-
6	SP3	3	-	11
7	Tahap II	6	7	14
	Jumlah	16	21	86

Sumber : Renakta IV Ditreskrimum Poldasu, diolah oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Setdaprovsu

2) Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 3.13
Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah perempuan dan anak Korban Kekerasan yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial	60	47	179
2	Jumlah perempuan dan anak Korban Kekerasan yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial	27	47	179

Sumber : Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu, diolah oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Setdaprovsu

3) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 3.14
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Korban Kekerasan	80	258	105

Sumber : Polda Sumatera Utara, diolah oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Setdaprovsu

4) Jumlah pekerja perempuan dan partisipasi Angkatan kerja

Tabel 3.15
Jumlah Pekerja Perempuan

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Wanita yang Bekerja	2.250.668	2.336.318	2.414.214
2	Jumlah pekerja perempuan di semua Instansi/lembaga Pemerintahan	155.804	125.832	144.965
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,35	52,58	52,58%

Sumber : BPS Provsu dan BKN Regional VI Medan, diolah oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu

Dalam rangka memotivasi dan advokasi kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan, edukasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan sejak dini dan penanganan KDRT, perlu dilakukan dan didukung menjadi komitmen bersama instansi/SKPD/lembaga terkait provinsi dan kabupaten/kota melalui kegiatan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Berkaitan dengan itu, ditetapkan Tim Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Percontohan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor

188.44/1152/KPTS/2016 tanggal 10 Maret 2016. Selain itu juga dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provsu Nomor 463/237/PPAKB/2015 dan Nomor 45/SKR/PKK PROV/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Kegiatan Kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Percontohan Pencegahan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu melakukan pelayanan penanganan pengaduan langsung dan tidak langsung serta pelayanan penanganan perlindungan sementara di rumah aman P2TP2A dengan jumlah korban seluruhnya 70 orang (perempuan dan anak).

Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengembangkan, membangun jejaring lebih luas lagi ke berbagai pihak, lembaga dan elemen masyarakat, agar dapat melakukan kegiatan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lebih luas pula. Pentingnya kesadaran dan kepedulian terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui :

- 1) Penerangan kepada calon korban, orang tua, keluarga dan lingkungan terdekat, masyarakat, tentang trafficking dan kekerasan lainnya beserta dampaknya.
- 2) Pencegahan terjadinya kekerasan dan Trafficking dengan melibatkan semua pihak baik keluarga, pemerintah, swasta, media massa, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat luas, serta kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, antar negara, regional maupun internasional.

- 3) Melaksanakan pelatihan keterampilan dan pembekalan, terutama bagi calon tenaga kerja baik tenaga kerja dalam negeri maupun ke luar negeri.
- 4) Penindakan dan penegakan hukum secara tegas, konsisten dan terus menerus terhadap pelaku trafficking dan kekerasan serta pihak yang mendukungnya.
- 5) Penanganan korban trafficking dan kekerasan melalui kegiatan rehabilitasi, konseling, pelayanan medis, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dari 10 provinsi penyangga utama program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), oleh karena itu, kegagalan program KKBPK di Sumatera Utara berdampak pada pencapaian program KKBPK secara nasional.

Total peserta KB baru sampai dengan bulan Desember 2016 mencapai 350.481 akseptor atau 78,32%, jika dibandingkan dengan Kontrak Kerja Provinsi (KKP) tahun 2016, namun jika dibandingkan dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM), sebesar 346.422 maka capaian PB mencapai 101,17% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Peserta KB Baru (PB) Terhadap KKP PB Tahun 2016

NO	METODE KONTRASEPSI	PENCAPAIAN	KKP	%
1	IUD	19.930	48.050	41,48
2	MOW	11.087	15.010	73,86
3	MOP	2.176	1.800	120,89
4	Kondom	40.032	25.000	160,13
5	Implant	56.952	50.540	112,69
6	Suntik	119.723	173.160	69,14
7	Pil	100.581	133.960	75,08
JUMLAH		350.481	447.520	78,32

Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu

Capaian peserta baru kontrasepsi hanya jenis MOP, Kondom dan Implant yang melampaui target KKP, sebaliknya IUD, MOW, Suntik dan PIL tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan minat peserta KB untuk menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti IUD dan MOW masih rendah, sebaliknya penggunaan kontrasepsi Non MKJP seperti Kondom dan Implant masih menjadi pilihan masyarakat. Ke depan diharapkan penggunaan MKJP semakin meningkat.

Pada tahun 2015, total peserta KB baru 289.721 akseptor dan KKP sebesar 257.965, dengan pencapaian sebesar 101,5%. Bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2016 sebesar 78,32% terdapat penurunan dalam persentase; namun bila dilihat dalam jumlah maka terdapat peningkatan jumlah akseptor PB yang dilayani pada tahun 2016 yaitu 350.481 akseptor.

Tabel 3.17
Peserta KB Aktif s.d Desember 2016
Terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP)

NO	METODE KONTRASEPSI	PENCAPAIAN	KKP	%
1	IUD	165.489	98.070	59,3
2	MOW	113.746	164.100	144,3
3	MOP	15.509	9.570	61,7
4	Kondom	131.663	95.150	72,3
5	Implant	231.586	211.090	91,1
6	Suntik & Pil	648.597	924.440	142,52
JUMLAH		1.306.590	1.502.420	114,98

Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu

Sementara itu untuk jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2016 tercatat 2.609.550 PUS, artinya mengalami kenaikan dibandingkan jumlah PUS pada tahun 2015 sebesar 2.327.673 PUS, artinya berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa CPR Sumatera Utara tahun 2016 mencapai 51,7% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu 68,93%.

Capaian kinerja lainnya dijelaskan sebagai berikut :

1) Bina Keluarga Balita (BKB)

Pada tahun 2016 jumlah kelompok BKB aktif di Sumatera Utara mencapai 2.842 kelompok dengan jumlah anggota BKB yang ber-KB sebanyak 74.997 orang dan kesertaan ber-KB mencapai 72,60%. Dibandingkan dengan tahun 2015, angka ini mengalami penurunan yaitu 2.878 kelompok aktif dengan jumlah anggota sebanyak 115.955 orang.

2) Bina Keluarga Remaja (BKR)

Pada tahun 2016 jumlah kelompok BKR aktif di Sumatera Utara mencapai 2.043 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 100.068 orang, dengan kesertaan ber-KB 73,04%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu 2.010 kelompok BKR dan jumlah anggota 70.589 orang.

3) Bina Keluarga Lansia (BKL)

Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah kelompok BKL aktif yaitu 1.815 kelompok dengan jumlah anggota aktif sebanyak 46.232 orang dan kesertaan ber-KB yaitu 71,70%. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu 1.866 kelompok aktif dengan jumlah anggota sebanyak 55.804 orang.

4) Kelompok UPPKS

Pada tahun 2016 jumlah kelompok UPPKS di Sumatera Utara mencapai 1.571 kelompok dimana 78,35% merupakan PUS peserta KB. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu 1.532 kelompok UPPKS dengan jumlah anggota sebanyak 23.494 orang, sementara yang berstatus PUS berjumlah 16.015 dimana 77,7% diantaranya atau 12.457 merupakan PUS peserta KB. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah kesertaan PUS ber KB dari seluruh anggota UPPKS telah melampaui target yang telah ditetapkan pada KKP tahun 2015 sebesar 49,5%.

Untuk beberapa indikator capaian program KKBPK lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah petugas lapangan KB baik PNS ataupun Non PNS sampai dengan Desember 2016 berjumlah 1.469 orang, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 1.272 orang.

- 2) *Unmetneed* Provinsi Sumatera Utara masing tinggi, sebesar 14,86% namun sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu 16,56%.

16. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan data perkembangan jumlah sarana angkutan darat untuk wilayah pelayanan antar kota dalam provinsi (AKDP), yang izinnnya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, tercatat secara rata rata dari tahun 2008 s.d 2016 sebesar 15,37%. Namun pada tahun 2016 jumlah sarana angkutan darat tumbuh sebesar 11,65% atau lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 14,22% atau bertambah sebanyak 218 unit kendaraan.

Berdasarkan realisasi jumlah penumpang pada tahun 2016 yang menggunakan angkutan umum jenis pelayanan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) tercatat sebanyak 11.933.150 orang, dengan rincian yang menggunakan kendaraan jenis MPU sebanyak 7.756.548 orang dan jenis bus sebanyak 4.176.603 orang. Jumlah pergerakan penumpang terbesar masih didominasi di wilayah Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang).

Tabel 3.18
Trend Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Darat
(Antar Kota Dalam Provinsi) di Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	DALAM TRAYEK				NON TRAYEK		JUMLAH	% PERTUMBUHAN
	MPU	BUS	AJDP	BUS BANDARA	TAKSI BANDARA	CARA SEWA		
2011	689	659	26	-	-	-	1.374	14,50
2012	652	641	66	-	-	-	1.359	-1,09
2013	535	660	108	13	273	49	1.638	20,53
2014	720	739	99	33	243	37	1.871	14,22

2015	834	774	136	59	230	56	2.089	11,65
2016	959	844	152	67	253	61	2.336	11,81

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Program kegiatan bidang darat yang sudah terlaksana pada tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengawasan operasional angkutan pemuat moda Bandara Kuala Namu.
- 2) Survey kesiapan prasarana jalan untuk angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- 3) Penyelenggaraan posko pemantauan angkutan Lebaran, Natal tahun 2016 serta Tahun Baru.
- 4) Penyelenggaraan perlombaan Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.
- 5) Penyelenggaraan seleksi Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.
- 6) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2016.

17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat (*the right to know*) untuk mendapatkan informasi tentang program dan kebijakan pembangunan Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meningkatkan peran Komisi Informasi dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi. Pada tahun 2016 Komisi Informasi menangani 124 kasus

(51 kasus berhasil diajudikasi, 5 kasus berhasil dimediasi, 11 kasus ditolak, 19 kasus gugur, 9 kasus dibatalkan, 10 kasus dihentikan dan 19 kasus sedang dalam proses).

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika, seperti :

- 1) Ketersediaan website milik pemerintah daerah tahun 2015 dan tahun 2016 bahwa Pemprowsu dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada publik melalui website www.sumutprov.go.id.
- 2) Aplikasi *e-Procurement* dalam proses tender pada tahun 2016 dikelola oleh Dinas Kominfo Provsu yang sebelumnya Biro Pembangunan Setdaprowsu.
- 3) Jumlah Pameran atau Expo yang dilaksanakan pertahun tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 1 kali yaitu : Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
- 4) Juara 3 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2016 yang diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada acara Festival Petunjukan Rakyat Tingkat Nasional tahun 2016 yang diselenggarakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 5) Cakupan pengembangan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan jumlah KIM berkisar 11,18 % di 10 kabupaten/kota (Langkat, Karo, Batu Bara, Labuhanbatu, Padangsidimpuan, Tapanuli Utara, Samosir, Sibolga, Padang lawas dan Toba Samosir).
- 6) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan menyangkut pelaksanaan tugas yang mencerminkan perbaikan kinerja yaitu :
 - a. Adanya peningkatan kualitas Sumber daya Manusia Pegawai.

- b. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam upaya penyebaran Informasi masyarakat.
- c. Adanya penambahan dan penguatan sarana dan prasarana di bidang teknologi Informasi.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui layanan *Smart Province*.

18. Urusan Wajib Pertanahan

Sampai dengan tahun 2016 kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam penyelesaian kasus sengketa konflik pertanahan, salah satunya dalam penyelesaian lahan diareal eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tersebut adalah karena adanya salah satu point ketetapan Keputusan BPN dalam penerbitan HGU atas Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN) yang berbunyi “menyerahkan pengaturan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam dictum kedua keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang. Hingga saat ini belum ada ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri Negara BUMN.

Tabel 3.19
Inventarisasi Data Sengketa Kasus Pertanahan Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Medan	36
2	Binjai	9
3	Langkat	6
4	Deli Serdang	32
5	Serdang Bedagai	19
6	Tebing Tinggi	2
7	Asahan	16
8	Pematangsiantar	2
9	Simalungun	32
10	Toba Samosir	19
11	Samosir	6
12	Humbang Hasundutan	10
13	Dairi	17
14	Batu Bara	8
15	Tanjungbalai	2
16	Padang Lawas	4
17	Mandailing Natal	11
18	Tapanuli Utara	23
19	Sibolga	2
20	Tapanuli Selatan	4
21	Labuhanbatu	6
22	Labuhanbatu Utara	22
23	Labuhanbatu Selatan	16
24	Pakpak Barat	5

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Gubernur Mendelegasikan Kewenangan Tahapan Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di daerah kepada Bupati/Walikota, agar optimal serta efektif dan efisien :

- 1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam hal pengadaan tanah terletak dalam 1 wilayah kabupaten/kota dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Dalam hal pengadaan tanah terletak dalam 1 wilayah kabupaten/kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan/atau anggaran badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
- 3) Pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara mutatis mutandis.

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian kinerja pada urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, terdapat 6 indikator yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Pembinaan Politik Daerah

a. Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, disebutkan bahwa perhitungan bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik sesuai Pasal 5 disebutkan bahwa nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sama dengan hasil perhitungan

jumlah bantuan APBN/APBD tahun sebelumnya dibagi jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

b. Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

Dari hasil verifikasi serta untuk tertib hukum dan administrasi pada tahun 2016 ada 15 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk di PAW melalui keputusan Gubernur Sumatera Utara.

c. Pendidikan Politik bagi Kader-Kader PKK dan Organisasi Wanita

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik bagi kaum perempuan di Sumatera Utara, serta memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam politik. Disamping itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi politik kedepannya, sehingga partisipasi jumlah pemilih pada Pemilu bisa lebih meningkat lagi setiap tahunnya. Adapun tema kegiatan pada tahun 2016 ini adalah “Meningkatkan Daya Saing dan Peran Wanita di Legislatif dan Dunia Per Politikan Tanah Air.”

d. Seri Dialog Demokrasi, yang dilaksanakan sebanyak 7 kali pada tahun 2016.

2) Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Ditujukan untuk pembinaan kepada organisasi masyarakat yang terdapat di Sumatera Utara. Adanya ini menunjukkan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas keberadaan sub struktur politik dimaksud, sehingga kerjasama pemerintah dengan masyarakat dapat lebih baik lagi. Untuk tahun 2016 kegiatan untuk pembinaan Ormas/LSM ini ada 2 kegiatan pada Program

Pendidikan Politik yakni : Seri Dialog Demokrasi dan Verifikasi dan Supervisi Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Dalam rangka menjalin kerukunan umat beragama, salah satu kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Pada tahun 2016 ada kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di Griya Hotel Medan pada tanggal 1 s.d 3 Juni 2016 dengan mengundang 100 orang peserta dari Pengurus Forum Kabupaten/Kota dan juga utusan masing – masing agama.

4) Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan adalah mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Pada tahun 2016 dianggarkan 8 kegiatan pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat provinsi diberikan kewenangan secara konkuren untuk menyelenggarakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dan dalam pelaksanaannya di distribusikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang dibentuk dengan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud.

Disamping menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan fungsi pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, agar penyelenggaraan otonomi daerah tidak bias dari konsep yang diatur dalam undang-undang.

Pembinaan otonomi daerah yang dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Memfasilitasi pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota baik hasil Pemiluada maupun sebagai konsekwensi penggantian Kepala Daerah yang berhalangan tetap atau karena permasalahan hukum sehingga harus digantikan oleh Wakil Kepala Daerah, demikian halnya dengan pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota yang ditugaskan untuk memimpin pemerintahan di kabupaten/ kota sebagai konsekwensi berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan pada saat bersamaan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai hasil Pemiluada belum ada, untuk itu dilaporkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota yang dilantik tahun 2016, yaitu : Kota Medan, Binjai, Sibolga, Tanjungbalai, Gunungsitoli, Kabupaten Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Karo, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat.

- b. Wakil Bupati yang dilantik menggantikan Bupati yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2) Memfasilitasi pemberhentian dan pengangkatan DPRD dan Pimpinan DPRD serta proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten/kota, yaitu : pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provsu sebanyak 5 orang, serta pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak 24 orang dari 12 kabupaten/kota.
- 4) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang menghasilkan 9 Kesepakatan Bersama dan 1 Perjanjian Kerjasama, antara lain :
- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Revitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Cash Management System untuk Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Interface dengan

Aplikasi SIMDA Keuangan dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional I Sumatera tentang Pembangunan *Smart Province* di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
- e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan The San Mateo Colleges Silicon Valley California Amerika Serikat tentang Kerjasama Peningkatan Pendidikan dan Penyelarasan Program Beasiswa Untuk Siswa dari Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia di The San Mateo Colleges Silicon Valley California Amerika Serikat.
- g. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Nias Barat dan Nias Utara tentang Kerjasama Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- h. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komando Daerah Militer I/ Bukit Barisan tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara.
- i. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- j. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Kerjasama Mewujudkan Pendidikan Lalu Lintas Kedalam Mata Pelajaran Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara TA. 2015 ke DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016, dan telah dihasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.
- 6) Melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri pada tahun 2016.
- 7) Memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui Buku Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 pada tahun 2016.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel antara lain : melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan *in-house training* terkait pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah pemahaman tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. Selain itu juga telah diterapkan penggunaan aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi antara lain SIMDA Keuangan yang terintegrasi dari proses penganggaran sampai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan Sistem Online Penerimaan Daerah.

Dengan diterapkannya sistem yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah tersebut, diharapkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dapat lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2016 persentase hasil penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat pada SKPD provinsi dan kabupaten/kota dan limpahan tingkat atas target 38% realisasi 57,03%, sehingga capaian kinerja 166%. Sebanyak 31 kasus/pengaduan masyarakat (12,92%) ditangani langsung/diperiksa Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan 209 (87,08%) kasus/pengaduan masyarakat dilimpahkan atau diteruskan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan daerah kabupaten/kota yang berwenang menanganinya.

Hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provsu pada kabupaten/kota tahun 2016, terdapat 245 temuan yang terdiri dari temuan administratif sebanyak 223 temuan dan kerugian dan kewajiban setor negara/daerah sebanyak 22 temuan, dengan nilai kerugian negara/daerahRp. 177.694.576,98. Dari jumlah 245 temuan tersebut menghasilkan sebanyak 269 rekomendasi, yang terdiri dari 247 rekomendasi yang bersifat perbaikan administratif dan 22 rekomendasi yang bersifat kewajiban setor senilaiRp. 177.694.576,98.

Jumlah PNS Pemprovsu berdasarkan pangkat, golongan, pendidikan dan jenis kelamin, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan,
Pendidikan dan Jenis Kelamin

Golongan	Tahun 2015	Tahun 2016
I	205	192
II	2.683	2.601
III	7.698	7.264
IV	1.036	1.065
Jumlah	11.685	11.122
Pendidikan	Tahun 2015	Tahun 2016
SD	259	222
SLTP	343	306
SLTA	4.590	4.253
D-3	844	855
S-1	4.562	4.469
S-2	935	997
S-3	15	20
Jumlah	11.685	11.122
Jenis Kelamin	Tahun 2015	Tahun 2016
Pria	7.052	6.684
Wanita	4.496	4.438
Jumlah	11.685	11.122

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Tabel 3.21
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional/Staff

Pejabat Struktural	Tahun 2015	Tahun 2016
I	1	1
II	52	40
III	367	354
IV	929	875
Fungsional	1.608	1.540
Staf	8.728	8.312
Jumlah	11.685	11.122

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Penyelesaian proses pensiun PNS Tahun :

Tahun 2015 : 26 orang

Tahun 2016 : 599 orang

Penyelesaian permasalahan kepegawaian (pelanggaran disiplin) :

Tahun 2015 : 26 orang

Tahun 2016 : 2 orang

Jumlah mutasi kepegawaian dalam pangkat dan jabatan :

1) Mutasi Kepegawaian dalam Pangkat

Tahun 2015 : 5.212 orang

Tahun 2016 : 6.009 orang

2) Mutasi Kepegawaian dalam Jabatan

Tahun 2015 : 0 orang

Tahun 2016 : 6 orang

Gambaran umum capaian kinerja di bidang persandian, antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdistribusinya berita sandi ke seluruh kabupaten/kota seSumatera Utara.
- 2) Terlaksananya komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Terlaksananya pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sampai dengan tahun 2016, rekapitulasi data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa se Sumatera Utara sebagai berikut : jumlah desa = 5.418, kelurahan = 666, kecamatan = 436 dan kabupaten/kota = 33.

Jumlah Lembaga PKK sebanyak 5.418, LPM sebanyak 5.418, Posyandu sebanyak 5.418 dan Karang Taruna sebanyak 5.418.

22. Urusan Wajib Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan sosial serta bencana lainnya, gelandangan pengemis, dimana kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Untuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistim “Panti” dan “Luar Panti” sistim panti memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistim luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dilokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penanganan PMKS meliputi bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan sosial.

Pada tahun 2016 penanganan tersebut diberikan kepada 2.372 orang sistim panti dan 3.005 orang dengan sistim non panti. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah difasilitasi untuk memperoleh bantuan sosial pada tahun 2015 dan tahun 2016 meliputi :

- 1) Sistim panti tahun 2015 sebanyak : 2.702 Orang
- 2) Sistim panti tahun 2016 sebanyak : 2.372 Orang
- 3) Sistim non panti tahun 2015 sebanyak : 3.036 Orang
- 4) Sistim non panti tahun 2016 sebanyak : 3.005 Orang

23. Urusan Wajib Kebudayaan

Capaian kinerja urusan wajib kebudayaan pada tahun 2016, dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pagelaran seni yang dilaksanakan pada tahun 2016 :

Tabel 3.22
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2016

No	Festival Seni dan Budaya	Pelaksanaan dan Lokasi
1	Festival Film Pendek	Tanggal 24 s.d 25 November 2016 di Hotel Sibayak Brastagi Kabupaten Karo
2	Festival Seni Nusantara	Tanggal 15 s.d 20 Mei 2016 di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat
3	Pengiriman Tim Kesenian ke Tingkat Nasional pada Festival Seni Tari di Pameran Gebyar Wisata Nusantara	Tanggal 26 s.d 29 mei 2016 di Balai Sidang Jakarta (Jakarta Convention Center)
4	The Great Culture of North Sumatera pada Acara Senggigi Fair	Tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Senggigi Square Lombok
5	The Great Culture of North Sumatera pada Acara Aceh International Festival	Tanggal 26 s.d 28 Agustus 2016 di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

6	The Great Culture of North Sumatera pada Acara Gebyar Wisata Perdagangan dan Investasi Nasional	Tanggal 17 s.d 20 Nopember 2016 di Mall Festival Citylink-Bandung
7	Festival Seni Nusantara pada Acara Festival Nasional Tari	Tanggal 4 s.d 8 Agustus 2016 di Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
8	Pendukungn Pelaksanaan Festival Danau Toba	Tanggal 9 s.d 12 September 2016 di Kabupaten Tapanuli Utara
9	Pameran dan Pagelaran Seni se Sumatera	Tanggal 19 s.d 22 November di Provinsi Jambi
10	Festival Kemerdekaan Pesona Toba	Tanggal 20 Agustus 2016 di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Simalungun

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

2) Kegiatan misi kesenian yang dilakukan, antara lain :

- a. Pengiriman Tim Kesenian ke tingkat Nasional;
- b. Temu Taman Budaya se Indonesia.

3) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2016 :

Tabel 3.23

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2016

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi
1	Situs Markas/Basis Pertahanan Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII	Desa Onom Hudon Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
2	Situs makam Raja Sisingamangaraja XII	Desa Onom Hudon Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
3	Situs Batu Aceh dan Batu Mejan Tinggalan Marga Lingga	Kabupaten Dairi
4	Situs Gua Jepang Berastagi, GBKP dan Rumah sakit Kusta	Desa Lau Simomo Kabupaten Karo

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

24. Urusan Wajib Statistik

Urusan wajib di bidang statistik hanya dilaksanakan pada bagian Pengendalian, Evaluasi dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung terlaksananya pembangunan sesuai dengan potensi daerah dan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, sehingga kondisi ini menuntut adanya kesiapan daerah dalam menyajikan ketersediaan data statistik.

Setelah terbitnya susunan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan statistik tidak lagi menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

25. Urusan Wajib Arsip

Pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis, pengelolaan arsip yang telah dilaksanakan di bidang arsip daerah adalah pengelolaan arsip Dinamis in aktif dan statis.

Proses/sistem pengelolaan arsip secara baku di bidang arsip daerah:

- 1) Mengumpulkan/menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprovsu.
- 2) Melakukan pemilahan arsip.
- 3) Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
- 4) Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
- 5) Melakukan penomoran arsip.

- 6) Membungkus arsip.
- 7) Membuat DPAS.
- 8) Menyimpan arsip ke dalam box.
- 9) Memberikan nomor box arsip.
- 10) Menyimpan boks arsip kedalam *Roll O'pack*.
- 11) Mengolah data arsip statis.

Tabel 3.24
Data Arsip yang Diolah di Bidang Arsip Daerah

No	Masalah	Tahun			
		2015		2016	
		Arsip	Box	Arsip	Box
1	Umum	69	7	290	59
2	Keuangan	3744	783	1839	300
3	Perekonomian	19	3	138	34
4	P.U dan Ketenagaan	2	1	649	108
6	Politik	-	-	11	1
7	Laporan	-	-	-	-
8	Kepegawaian	24	3	257	92
9	Hukum	-	-	-	-
10	Program	-	-	-	-
11	Kesejahteraan Rakyat	6	1	45	12
12	Pemerintahan	1	1	677	71
13	Pengawasan	-	-	31	4
14	Perkebunan	-	-	-	-
15	Kesehatan	-	-	25	9
Jumlah		3865	799	3962	690

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu

Presentase peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola arsip tahun 2015 dan 2016

- Box $3962 : 3865 \times 100 = 102,51 \%$
- Arsip $690 : 799 \times 100 = 86,36 \%$

SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- 1) Inspektorat Provsu
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
- 3) Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu
- 4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provsu
- 5) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provsu
- 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provsu
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu
- 8) Dinas Koperasi dan UKM Provsu
- 9) Dinas Pertanian Provsu
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu
- 11) Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provsu
- 12) Dinas Bina Marga Provsu
- 13) Dinas Perhubungan Provsu
- 14) Dinas Perkebunan Provsu
- 15) Dinas Pendidikan Provsu
- 16) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu
- 17) Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu
- 18) Dinas Kesehatan Provsu
- 19) Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
- 20) Sekretariat Korpri Provsu
- 21) Biro Umum Setdaprovsu

26. Urusan Wajib Perpustakaan

Gambaran umum pencapaian kinerja urusan wajib perpustakaan, dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016
a	Pertambahan koleksi buku di perpustakaan daerah	755.693 Eksemplar	757.540 Eksemplar
b	Peningkatan Pengunjung ke perpustakaan daerah	80.283Orang	84.683Orang
c	Peningkatan minat baca terhadap koleksi buku di perpustakaan daerah	75.468Orang	95.528Orang
d	Peningkatan Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	96.433Judul	97.472Judul
e	Ketersediaan e-book di perpustakaan daerah	1.700Keping	1.700Keping

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu

Perpustakaan sekolah dan Taman Baca Masyarakat (TBM) memiliki peran penting dalam pembinaan minat baca masyarakat terutama anak sekolah. Untuk mewujudkan Sumatera Utara Berbudaya Baca, tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melakukan kegiatan pengembangan beberapa perpustakaan sekolah dan Taman Baca Masyarakat kabupaten/kota di Sumatera Utara. Adapun perpustakaan sekolah dan TBM yang dikembangkan antara lain :

- 1) 29 Perpustakaan SD/MI di Sumatera Utara;
- 2) 36 Perpustakaan SLTP di Sumatera Utara;
- 3) 21 Perpustakaan SLTA di Sumatera Utara; dan
- 4) 20 Taman Bacaan Masyarakat di Sumatera Utara.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 181.680,68 Km² dengan luas lautan 108.699,45 Km² (59,8%) dan luas daratan 72.981,23 Km² (40,2%). Sumatera Utara memiliki Panjang garis pantai 1.300 Km yang terdiri dari Pantai Timur sepanjang 545 Km dan Pantai Barat serta Pulau-Pulau Nias sepanjang 755 Km.

Potensi perikanan tangkap di WPP 571 (Pantai Timur) dan WPP 572 (Pantai Barat) sebesar 841.200 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan perikanan tangkap di Sumatera Utara pada tahun 2015 baru mencapai 472.683 ton atau (56,19 %). Sedangkan potensi perikanan budidaya di Sumatera Utara sebesar 249.444,5 Ha.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara seperti dimaksud diatas, maka dilakukan pendekatan wilayah pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu :

1) Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan I (Pantai Barat Sumatera Utara)

Wilayah pengembangan Kelautan dan Perikanan I (Pantai Barat) yang terdiri dari 12 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, serta Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 572) pantai barat Sumatera Utara sebesar 565.200 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan perikanan tangkap

mencapai 127.158.8 ton atau 20 % dari potensi perikanan tangkap Sumatera Utara di WPP 572. Adapun potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir sampai dengan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah ikan tuna, tongkol, cakalang, kakap, kerapu, kembung, tenggiri, teri Medan, layur, ikan hias, serta potensi terumbu karang dan wisata bahari.

2) Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan II (Wilayah Tengah Sumatera Utara)

Wilayah ini terdiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, dan Kota Pematangsiantar. Kabupaten/kota di wilayah tengah Sumatera Utara memiliki potensi besar perikanan budidaya air tawar yang merupakan sentra perikanan budidaya dan potensi penangkapan perairan umum, dimana budidaya air tawar yang ada di Danau Toba yaitu budidaya Ikan Mas dan Ikan Nila. Ikan endemik yang ada di Danau Toba yaitu ikan pora-pora yang jumlah populasi ikan tersebut menyebar di seluruh kawasan Danau Toba. Masyarakat sekitar memanfaatkan ikan tersebut sebagai vahan makanan yang telah diolah untuk meningkatkan nilai jual ikan tersebut.

3) Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan III (Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara)

Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan III (Pantai Timur) Sumatera Utara terdiri dari 12 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, dan Tanjungbalai, memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. Tingkat pemanfaatan telah mencapai 345.470,2 Ton. Adapun potensi jenis ikan unggulan

di Selat Malaka adalah jenis ikan kakap, kerapu, teri Medan, kembung, tenggiri, tembang, pari dan cakalang. Disamping itu, terdapat potensi pengembangan wisata bahari di Sumatera Utara yang merupakan tempat rekreasi dan menambah pendapatan daerah dari sektor wisata bahari.

Total Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 808.090,7 Ton (angka sementara) atau naik 2,13% bila dibandingkan produksi perikanan tahun 2015 sebesar 791.209.80 Ton. Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2016 mencapai 504.618,4 Ton (angka sementara) atau naik 2% bila dibandingkan produksi perikanan tangkap di laut tahun 2015 yang mencapai 494.724 Ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait intensif melaksanakan penegakan hukum dalam pemberantasan pencurian ikan (*Illegal fishing*) oleh pihak asing dengan melakukan kegiatan operasi rutin dan operasi terpadu dalam pengawasan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Sumatera Utara.

Produksi perikanan tangkap di perairan umum pada tahun 2016 mencapai 86.728,9 Ton (angka sementara) atau meningkat 2% bila dibandingkan produksi perikanan tangkap diperairan umum pada tahun 2015 mencapai 85.028,4 Ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum disebabkan karena penebaran benih diperairan umum (restocking) di danau, sungai, dan lubuk larangan. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 sebesar 216.734,4 Ton (angka sementara) atau naik 2,5% bila dibandingkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 yang mencapai 211.457,0 Ton.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 mengalami perubahan dikarenakan adanya pertemuan validasi data tingkat nasional, dimana pada saat validasi tingkat nasional ini, panitia selalu mengundang para pakar seperti Asosiasi Pembudidaya Ikan/ Udang/ Rumput Laut, Asosiasi Pengusaha Pakan dan UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Seluruh Indonesia, sehingga data yang divalidasi tingkat provinsi akan di crosscek dengan data produk ataupun pakan ikan, penjualan/pemasaran yang beredar di daerah/provinsi masing-masing, sehingga bisa berdampak terhadap kenaikan maupun penurunan angka produksi budidaya dengan hasil perbandingan data-data tersebut.

Dalam upaya pelestarian ikan endemik Danau Toba, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil memijahkan/membenihkan ikan (*Neolissochillus Thienemanni Sumatranus*), diharapkan benih ikan dapat berkembang dengan baik sehingga dapat meningkatkan kembali populasi ikan endemik Danau Toba.

Tabel 3.26
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016

No	Rincian	Potensi	Produksi 2015	Produksi 2016	Persentase (%)
1	Perikanan Tangkap		579.752,4 ton	591.347,3 ton	Meningkat 2%
	a Penangkapan di laut	841.200ton/thn	494.724 ton	504.618.4 ton	Meningkat 2,0%
	b Penangkapan di perairan umum	155,797 ton/thn	85.028,4 ton	86.728,9 ton	Meningkat 2,0%
2	Perikanan Budidaya	138.647,5 Ha	211.457,0 ton	216.743.4 ton	Meningkat 2,5%
	a Budidaya tambak	20.000 Ha	29.487,0 ton	30.214,0 ton	Meningkat 2,46 %
	b Budidaya air laut	100.000 Ha	4.361,8 ton	4.464,9 ton	Meningkat 2,36 %
	c Budidaya air tawar	18.647,5 Ha	177.608,2 ton	182.064,5 ton	Meningkat 2,5%
TOTAL			791.209.8 ton	808.090,7 ton	Meningkat 2,13%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Ekspor hasil perikanan pada tahun 2016 mencapai 63.135,16 Ton atau mengalami kenaikan 11,04% bila dibandingkan ekspor hasil perikanan pada tahun 2015 sebesar 56.855,75 Ton. Nilai ekspor hasil perikanan Sumatera Utara pada tahun 2016 mencapai US\$ 334.305.733,24 atau naik 35,43% bila dibandingkan nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 2015 mencapai US\$ 246.829,677,64. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2016 mencapai 42,6kg/kapita/tahun (angka sementara), atau meningkat 2,99% bila dibandingkan angka konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 41,3 kg/kapita/thn.

Tabel 3.27
Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 2016

No	Rincian	Capaian 2015	Capaian 2016	Persentase
1	Produksi Perikanan Tangkap	579.752,4 Ton	591.347,3 Ton	Meningkat 2%
2	Produksi Perikanan Budidaya	211.457,0 Ton	216.743.4 Ton	Meningkat 2,5%
3	Ekspor Hasil Perikanan	56.855,75 Ton	63.135,16 Ton	Meningkat 11,0%
4	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US\$246.829.677,64	US\$334.305.733,24	Meningkat 35.43%
4	Tingkat Konsumsi Ikan Kg/kapita/tahun	41.3	42,6	Meningkat 2.99%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

2. Urusan Pilihan Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih

besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP Sumatera Utara pada tahun 2016 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2016 (Triwulan III 2016) sebesar 100,18 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 98,61, nilai NTP yang lebih tinggi ini berarti petani mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 dan 2016

Uraian	2015	2016*
Nilai Tukar Petani (NTP)	98,61	100,18
- Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP)	96,97	98,12
- Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	97,91	98,03

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

*Keterangan : *Data Sementara BPS Prov. Sumut yang diolah Dinas Pertanian Provsu*

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2016 bahwa produksi padi sebesar 4.610.097 ton atau meningkat sebesar 13,94% bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2015, Produksi jagung pada ASEM tahun 2016 sebesar 1.557.441 atau meningkat sebesar 2,50% bila dibandingkan dengan produksi jagung Tahun

2015, Produksi kedelai berdasarkan ASEM Tahun 2016 sebesar 5.062. Peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas oleh adanya dukungan kegiatan UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele) tahun 2015 dan 2016.

Adapun secara lebih rinci perkembangan produksi tanaman pangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014–2016 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	ATAP 2014	ATAP 2015	ASEM 2016	%-tase (4/3)	%-tase (5/4)
1	Padi Sawah					
	- Luas Panen (Ha)	676.724	731.811	826.696	8,14	12,97
	- Produktivitas (Kw/Ha)	51,58	52,87	53,07	2,50	0,38
	- Produksi (Ton)	3.490.516	3.868.880	4.387.130	10,84	13,40
2	Padi Gogo					
	- Luas Panen (Ha)	40.594	49.958	58.935	23,07	17,97
	- Produktivitas (Kw/Ha)	34,62	35,22	37,83	1,73	7,41
	- Produksi (Ton)	140.523	175.949	222.967	25,21	26,71
3	Padi					
	- Luas Panen (Ha)	717.318	781.769	885.631	8,98	13,29
	- Produktivitas (Kw/Ha)	50,62	51,74	52,05	2,21	0,60
	- Produksi (Ton)	3.631.039	4.044.829	4.610.097	11,40	13,98
4	Jagung					
	- Luas Panen (Ha)	200.603	243.770	252.688	21,52	3,66
	- Produktivitas (Kw/Ha)	57,82	62,33	61,63	7,80	(1,12)
	- Produksi (Ton)	1.159.795	1.519.407	1.557.441	31,01	2,50
5	Kedelai					
	- Luas Panen (Ha)	5.024	5.303	3.955	5,55	(25,42)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	11,36	12,35	12,80	8,71	3,64
	- Produksi (Ton)	5.705	6.549	5.062	14,79	(22,71)
6	Kacang Tanah					
	- Luas Panen (Ha)	8.311	7.342	4.094	(11,66)	(44,24)

NO	Uraian	ATAP 2014	ATAP 2015	ASEM 2016	%-tase (4/3)	%-tase (5/4)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	11,76	11,60	11,90	(1,36)	2,59
	- Produksi (Ton)	9.777	8.517	4.874	(12,89)	(42,77)
7	Kacang Hijau					
	- Luas Panen (Ha)	2.603	2.712	1.928	4,19	(28,91)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	11,17	11,28	11,26	0,98	(0,18)
	- Produksi (Ton)	2.907	3.060	2.171	5,26	(29,05)
8	Ubi Kayu					
	- Luas Panen (Ha)	42.062	47.837	34.853	13,73	(27,14)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	328,88	338,54	352,37	2,94	4,09
	- Produksi (Ton)	1.383.346	1.619.495	1.228.138	17,07	(24,17)
9	Ubi Jalar					
	- Luas Panen (Ha)	11.130	8.952	6.380	(19,57)	(28,73)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	131,74	136,69	143,47	3,76	4,96
	- Produksi (Ton)	146.622	122.362	91.531	(16,55)	(25,20)

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Potensi perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.30
Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Usaha dan Komoditi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Jenis Komoditas		Perkebunan Rakyat		P T P N	
			Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet		394,817.00	332,173.00	38,530.00	35,058.00
2	Kelapa Sawit	TBS	418,156.44	5,765,248.50	287,841.00	4,705,646.00
		MS		1,272,246.67		1,092,451.00
		IS		196,425.00		192,778.00
3	Kopi Arabika		63,531.00	53,214.00	-	-
	Robusta		21,661.00	11,245.00	-	-
4	Kelapa		110,922.00	95,123.00	-	-
5	Kakao		64,734.00	41,254.00	-	-
6	Cengkeh		3,427.00	852.00	-	-
7	Kemenyan		22,998.00	5,234.00	-	-
8	Kulit Manis		5,865.88	3,854.04	-	-

No	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat		P T P N	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
9	Nilam	739.00	531.00	-	-
10	Kemiri	11,232.00	13,458.00	-	-
11	Tembakau	1,702.00	1,425.00	361.00	164.00
12	Tebu	961.00	4,895.00	1,509.00	348,621.00
13	Pala	180.00	124.00	-	-
14	Lada	262.00	134.00	-	-
15	Kapuk	527.00	225.00	-	-
16	Gambir	2,182.00	2,335.00	-	-
17	Teh	-	-	3,904.00	6,948.00
18	Aren	6,188.00	4,125.00	-	-
19	Pinang	5,935.00	4,382.00	-	-
20	Vanili	222.00	116.00	-	-
21	Jarak	32.00	18.00	-	-
22	Kapulaga	34.00	32.00	-	-
23	Jambu Mete	21.00	15.00	-	-
24	Sereh Wangi	-	-	-	-
Jumlah		1,136,329.32	2,043,435.71	332,145.00	1,676,020.00

Sumber : Dinas Perkebunan Provsu

Ket : *) Estimasi angka sementara 2016

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan asal ternak berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyediaan pangan asal ternak yang cukup baik kuantitas dan kualitas yang berdaya saing yaitu melalui peningkatan populasi ternak dan produksi serta berdaya saing maka salah satu capaian kinerja yang dapat dilihat yaitu Populasi ternak besar dan kecil serta produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu). Populasi ternak besar dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2015 dan 2016 (ekor)

No	JenisTernak	Tahun		Persentase (%)
		2015	2016*	
1	Sapi potong	662.234	683.332	103,18
2	Sapi Perah	1.078	1.163	107,88
3	Kerbau	115.365	116.403	100,89
4	Kambing	868.731	892.667	102,75
5	Domba	611.427	623.677	102,00
6	Babi	1.088.229	1.120.261	102,94
7	Ayam Buras	14.254.756	15.562.403	109,17
8	Ayam Petelur	15.207.333	15.245.074	100,24
9	Ayam Pedaging	49.798.186	50.207.686	100,82
10	Itik	2.529.676	2.903.906	114,79
11	Itik Manila	656.031	727.548	110,90

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu

Keterangan : * Angka Sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat semua komoditi ternak menunjukkan peningkatan, peningkatan populasi ternak sapi potong sebesar 103,18%, sapi perah 107,88%, kerbau 100,89%, kambing 102,75%, domba 102,00%, babi 102,94%, ayam buras 109,17%, ayam ras petelur 100,24%, ayam pedaging 100,82% , itik 114,79% dan itik manila 110,90%. Program kegiatan pendukung keberhasilan sasaran ini antara lain adalah program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan penerapan teknologi peternakan dan program pengembangan agribisnis.

3. Urusan Pilihan Kehutanan

Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795,02 Ha (42,90% dari luas

total wilayah), terdiri dari Hutan Konservasi seluas 427.007,49 Ha, Hutan Lindung seluas 1.206.881,32 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769,79 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 704.452,09 Ha, dan Luas Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 75.684,33 Ha.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2015 adalah 7.351,35 hektar yang terdiri dari rehabilitasi lahan di dalam kawasan hutan seluas 5.426,30 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 1.925,05 hektar, sedangkan untuk tahun 2016 luas lahan yang telah direhabilitasi adalah 2.973,56 hektar yang terdiri dari rehabilitasi lahan di dalam kawasan hutan seluas 2.964,56 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 9,00 hektar. Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 yaitu 6.758.046,52 hektar.

Kegiatan Penghijauan yang telah dilakukan pada tahun 2015 seluas 352,56 hektar sedangkan untuk tahun 2016 kegiatan penghijauan seluas 6,64 hektar. Rendahnya angka total luas lahan yang direhabilitasi, kegiatan reboisasi kawasan hutan, dan penghijauan pada tahun 2016 dikarenakan banyak kabupaten/kota yang tidak melaporkan luas lahan yang direhabilitasi, kegiatan reboisasi kawasan hutan, dan penghijauan di daerah kabupaten/kota tersebut.

Gangguan keamanan hutan yaitu perambahan dan permukiman liar juga masih terjadi pada beberapa kabupaten/kota yakni di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Upaya yang dilakukan dalam penanganan gangguan keamanan hutan adalah melakukan pengawasan terhadap gangguan keamanan hutan, melaksanakan patroli dan operasi penindakan serta

pemasangan plank larangan pada lokasi yang rawan terhadap gangguan hutan.

Berbagai Program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan fungsi kawasan hutan agar menjadi lebih produktif dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh Provinsi Sumatera Utara, antara lain Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (bulan Maret), Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Pohon Nasional (bulan November dan Desember), penanaman 1 milyar pohon (*One Billion Indonesia Trees for The World-OBIT*). Dalam rangka gerakan penanaman satu milyar pohon (OBIT) tahun 2015 jumlah realisasinya adalah 45.939.035 batang pohon, dan untuk tahun 2016 terealisasi 2.560.231 batang pohon.

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, Batu Bara, air dan panas bumi. Berikut ini data pembangkit terpasang di Sumatera Utara yang memasok listrik ke sistem SUMBAGUT :

Tabel 3.32
Pembangkit Listrik Wilayah Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT)

No	Lokasi Pembangkit	Jenis Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang (MW)
Sektor Belawan			
1	PLTU, PLTGU, PLTG, PLTD sewa	Diesel dan Gas	1284
Sektor Medan			
2	Glugur	Gas	36
3	Paya Pasir	Diesel dan Gas	119
4	Titi Kuning	Diesel	25
5	PLTD Sewa	Diesel	335
Sektor Pandan			
6	Sipansihaporas	Air	50
7	Renun	Air	80
8	PLTMH tersebar	Air	5
Sektor Labuhan Angin			
9	Labuhan Angin #1, #2	Batu Bara	230
Sektor Pangkalan Susu			
10	Pangkalan Susu #1, #2	Batu Bara	440
Independent Power Producer (IPP)			
11	Asahan I (#1, #2)	Air	180
12	Asahan II	Air	90
13	PLTM Parlilitan	Air	7,5
14	PLTM Silau	Air	8
15	PLTM Huta Raja	Air	5
16	PLTM Karai	Air	7
17	Sibayak #1	Panas Bumi	10
18	PLTU Growth Sumatera	Biomassa	11
19	PLTU Growth Asia	Biomassa	20
20	PLTU Rambutan	Biomassa	2
21	PLTA Wampu	Air	45
22	Pembangkit wilayah NAD	Batu Bara, Diesel, Biomassa	463
Total			3452,5

Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara diolah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Data Bank Indonesia pada tahun 2016, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,5 %. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angka di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7 % maka kebutuhan listrik pada Tahun 2017 akan mengalami kenaikan 133 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 2033 MW. Jika tidak maksimal perbaikan kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi.

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan kegiatan yang cukup penting, yaitu Pembangunan *Solar Home System* (SHS) 50 Wp di desa terpencil di Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan melistriki rumah tangga di desa terpencil dengan fokus pada aspek penerangan rumah kapasitas maksimum 50 Watt peak. Output kegiatan adalah telah membangun SHS di dua kabupaten di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Langkat Kecamatan Kuala sebanyak 60 unit, antara lain : Desa Blangkahan sebanyak 30 Unit, Desa Garunggung sebanyak 17 Unit, Desa Parit Bindu sebanyak 13 Unit. Di Kabupaten Nias Barat sebanyak 100 unit, antara lain : Desa Lahusa Kecamatan Sirombu sebanyak 17 Unit, Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi sebanyak 12 Unit, Desa Sitolu Banua Kecamatan Lahomi sebanyak 21 Unit, Desa Sisobaoho Kecamatan Lahomi sebanyak 2 Unit, Desa Sitolu Banua Fadoro Kecamatan Moro'o sebanyak 34 Unit, dan Desa Gunung Baru Kecamatan Moro'o sebanyak 14 Unit.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), bertujuan untuk mengoptimalkan potensi *hydropower* yang ada dan memberi akses listrik kepada masyarakat atau rumah tangga sekitar yang belum terlistriki. Output dari kegiatan ini adalah telah terbangunnya PLTMH di dua lokasi di Sumatera Utara, yaitu di Desa Sitabo-tabo Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak satu unit dengan daya terbangkit dari PLTMH yang telah dibangun sebesar 17 kw, dan di Desa Pattialo Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak satu unit dengan daya terbangkit dari PLTMH sebesar 15 kw.

Pembangunan di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sejak diproduksi mulai bulan November 2013, sumur Benggala – 1 di Desa Tajung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat terus mengalami penurunan di karenakan sifat alamiahnya. Pemboran sumur Benggala - 2 dan benggala – 3 yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP. Pangkalan Susu tidak dapat mencukupi kebutuhan Sumatera Utara akan gas bumi baik untuk sektor industri maupun sektor rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan Sumatera Utara akan gas bumi tahun 2016 yang mencapai 20 juta kaki kubik per hari dari 6 juta kaki kubik per hari yang dapat diproduksi oleh sumur gas Benggala 1, Benggala 2 dan Benggala 3, PT. Pertamina EP. Pangkalan Susu mendatangkan suplai dari Arun – Aceh berupa gas alam dari hasil regasifikasi LNG melalui pipa Arun – Belawan (Arbel). Hasil Rapat tanggal 29 Januari 2016 yang dilakukan oleh PT. PGN (Persero) Tbk dan PT. Pertamina dan dihadiri oleh Ditjen Migas bersama dengan Kementerian ESDM dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara yang membahas tentang Harga Gas untuk Industri di Medan menghasilkan penurunan harga gas untuk industry dari US\$ 13,8/MMBTU menjadi US\$ 12,71/MMBTU.

Tabel 3.33
Lifting Minyak Bumi sampai Triwulan IV Tahun 2016

NO	Kabupaten/Kota Penghasil	LIFTING	
		Prognosa APBNP 2016 (Ribu Barel)	Realisasi s/d TW IV 2016 (Ribu Barel)
1	Kabupaten Langkat	240,67	186,09
2	Kabupaten Padang Lawas	0,00	0,00
3	Kota Binjai	0,09	0,00
4	Kabupaten Deli Serdang	0,002	1,09
JUMLAH		240,76	187,18

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu.

Tabel 3.34
Lifting Gas Bumi sampai Triwulan IV Tahun 2016

NO	Kabupaten/Kota Penghasil	LIFTING	
		Prognosa APBNP 2016 (Ribu Barel)	Realisasi s/d TW IV 2016 (Ribu Barel)
1	Kabupaten Langkat	1.773,57	1.926,37
2	Kota Binjai	0	0
3	Kabupaten Deli Serdang	174,01	178,84
JUMLAH		1.947,58	2.105,21

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu.

Pembangunan di Bidang Pertambangan Umum

Dasar dari penerbitan IUP adalah Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 1095/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. Pengelolaan izin usaha pertambangan mineral dan Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sumatera Utara dikeluarkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait lainnya seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pusat Sumber Daya Air (PSDA), Badan Wilayah Sungai Sumatera Wilayah II dan Instansi terkait lainnya. Himbauan kepada pengusaha tambang agar dalam melaksanakan kegiatan penambangan mineral dan Batu Bara wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen IUP yang telah dimilikinya terutama masalah Lingkungan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal ini dibagi 2 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan kewenangannya), dan izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan Tahun Anggaran 2016, adalah ada sebanyak 173 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan, non batuan dan pasir laut.

Tabel 3.35
Data Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Usaha
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PETI (Orang)	Luas (Ha)	Golongan Bahan Galian
1	Langkat	30	30,50	Batuan
2	Binjai	2	1,50	Batuan
3	Deli Serdang	30	10,00	Batuan
4	Serdang Bedagai	20	5,20	Batuan
5	Batu Bara	30	7,00	Batuan
6	Asahan	30	0,25	Batuan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PETI (Orang)	Luas (Ha)	Golongan Bahan Galian
7	Labuhanbatu Utara	12	0,24	Batuan
8	Labuhanbatu	17	1,30	Batuan
9	Labuhanbatu Selatan	10	4,00	Batuan
10	Karo	37	3,50	Batuan
11	Dairi	41	3,50	Batuan/Logam
12	Phakpak Bharat	35	1,20	Batuan
13	Simalungun	15	0,75	Batuan
14	Samosir	15	4,00	Batuan
15	Toba Samosir	15	3,67	Batuan
16	Tapanuli Utara	77	26,20	Batuan
17	Humbang Hasundutan	20	4,00	Batuan
18	Tapanuli Tengah	70	4,90	Batuan
19	Tapanuli Selatan	50	30,00	Batuan
20	Padang Lawas	15	3,00	Batuan
21	Padang Lawas Utara	30	6,00	Batuan
22	Mandailing Natal	500	35,00	Batuan/Logam
23	Nias	21	4,50	Batuan
24	Nias Selatan	15	5,00	Batuan
25	Gunungsitoli	10	2,00	Batuan
26	Nias Barat	16	2,50	Batuan
27	Nias Utara	15	2,50	Batuan
Jumlah		1178	202,21	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

5. Urusan Pilihan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara
2014-2016

No	BULAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Januari	22.594	20.103	13.103
2	Februari	22.058	21.820	17.737
3	Maret	21.374	19.720	18.017
4	April	19.072	17.455	15.647
5	Mei	22.345	19.943	17.628
6	Juni	21.939	17.754	15.084
7	Juli	19.983	18.543	20.524
8	Agustus	19.190	18.040	18.198
9	September	20.539	17.635	21.679
10	Oktober	23.624	16.430	23.426
11	November	25.102	18.911	23.650
12	Desember	33.017	22.025	
Jumlah		270.837	229.288	204.693

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

Tabel 3.37
Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2015-2016

No	Wisatawan	2015	2016
1	Domestik	1,49	2,80
2	Mancanegara	2,10	3,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

6. Urusan Pilihan Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2015 adalah 20,21% dan pada tahun 2016 sebesar 19,98%. Pertumbuhan industri besar dan sedang di Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 5,98% dan tahun 2016 sebesar 4,64%, sedangkan

pertumbuhan industri mikro dan kecil tahun 2015 sebesar 6,06% dan tahun 2016 sebesar 10,75%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan

Komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara antara lain *Crude Palm Oil* (CPO), karet alam, produk kimia organik, kopi dan rempah-rempah, dan produk hasil laut. Volume ekspor Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 9.008.520 ton, dan pada tahun 2016 sebesar 8.380.983 ton. Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar US\$ 7.752.788.000 dan pada tahun 2016 sebesar US\$ 7.762.283.000.

Volume import Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 6.853.734 ton dan pada tahun 2016 sebesar 6.819.193 ton. Nilai import Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar US\$ 3.988.439.000 dan pada tahun 2016 sebesar US\$ 3.914.490.000. Surplus/minus neraca perdagangan internasional pada tahun 2015 sebesar US\$ 3.764.348.000 dan pada tahun 2016 sebesar US\$ 3.847.793.000.

8. Urusan Pilihan Transmigrasi

Penempatan transmigrasi di Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan lagi sejak tahun 2004 dikarenakan sulitnya memperoleh lahan untuk pemukiman transmigrasi baru. Fokus dari kinerja urusan pilihan transmigrasi pada tahun 2016 adalah pengembangan wilayah transmigrasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan pada prinsipnya adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa. Untuk melaksanakan tugas terkait dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini pendanaannya ditampung dalam APBN yang dilaksanakan oleh SKPD yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penugasan yang diberikan oleh Kementerian teknis.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat, mengingat terbatasnya perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun yang di berikan kepada kabupaten/kota dilaporkan sebagai berikut :

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah melalui kementerian teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, dengan Sumber anggaran berasal dari APBN sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 305.700.000,- atau 17,98 %.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu, dengan Sumber anggaran berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 546.394.000,- dan realisasi sebesar Rp. 443.612.000,- atau 81,19%.
3. Dinas Pertanian Provsu, dengan sumber dan jumlah anggaran :
 - a. Sumber anggaran berasal dari APBN Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 371.585.129.000,- dan realisasi sebesar Rp. 220.353.256.468,- atau 59,06%.
 - b. Sumber anggaran berasal dari APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 1.724.910.000,- dan realisasi sebesar Rp. 393.013.150,- atau 22,78%.
 - c. Sumber anggaran berasal dari APBN Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 2.001.195.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.319.112.000,- atau 65,92%.
4. Dinas Perkebunan Provsu, dengan sumber dan jumlah anggaran :
 - a. Sumber anggaran berasal dari APBN Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 19.557.334.000,- dengan realisasi sebesar 13.560.042.545,- atau sekitar 69,33%.
 - b. Sumber anggaran berasal dari APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 696.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 681.623.000 atau sekitar 97,86%.

5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, dengan Sumber anggaran berasal dari APBN Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 10.697.448.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.439.139.880,- atau sekitar 88,24%.
6. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu, dengan Sumber anggaran berasal dari APBN Kementerian Sosial RI sebesar Rp.1.272.076.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.263.387.500,- atau 99,32%.
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu, dengan Sumber anggaran berasal dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum RI sebesar Rp. 21.397.712.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.104.267.000,- atau 84,61%.
8. Dinas Bina Marga Provsu, dengan sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 53.256.389.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.240.258.000,- atau 99,97 %.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas Kepala Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota diluar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Kerjasama antar daerah.
2. Kerjasama luar negeri.
3. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
4. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.
5. Pembinaan batas wilayah.
6. Pencegahan dan penanggulangan bencana.
7. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.
8. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun 2016 Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Nias Barat dan Nias Utara tentang Kerjasama Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara.

Maksud dilaksanakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk mencapai kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak,

dengan tujuan mewujudkan perlindungan terhadap anak melalui pemenuhan hak-hak anak agar hidup, tumbuh dan berkembang.

Ruang lingkup kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016, yaitu :

- 1) Bidang kesejahteraan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak (hidup, tumbuh dan berkembang).
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Kerjasama Luar Negeri

Di bidang kerjasama luar negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 melaksanakan kerjasama dengan *The San Mateo Colleges Silicon Valley California* Amerika Serikat.

Bidang kerjasama yang dilaksanakan yaitu peningkatan pendidikan melalui penyelarasan program beasiswa untuk siswa.

C. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Mitra yang diajak kerjasama adalah :

- 1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 2) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional I Sumatera.
- 4) Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan.
- 5) Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Bidang kerjasama yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2) Pengembangan dan penggunaan aplikasi *Cash Management System (CMS) Inteface* dengan aplikasi SIMDA.
- 3) Pengelolaan air limbah domestik.
- 4) Penyediaan Layanan *Information and Communication Technology (ICT) – Smart Province*.
- 5) Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.
- 7) Pendidikan lalu lintas untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Padatahun 2016 ada beberapa kegiatan yang melibatkan FORKOPIMDA didalamnya, antara lain :

- 1) Pelaksanaan koordinasi konflik sosial.
- 2) Rapat koordinasi (RAKORDA) Kesbangpol dan Linmas, KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 3) Penggalangan cipta kondisi keamanan Sumatera Utara.
- 4) Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN).

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan instansi vertikal dalam pelaksanaannya guna terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.

Kegiatan dilaksanakan sesuai amanah dari Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 dan juga untuk meningkatkan sistem pelaporan sebagaimana target yang ditetapkan dalam rencana aksi tahun 2016. Dari rapat ini diperoleh informasi bahwa sumber – sumber konflik di Sumatera Utara antara lain bersumber dari : Konflik Sara, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Batas Wilayah.

2) Penggalan Cipta Kondisi Sumatera Utara

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas isu – isu aktual yang sedang dan akan terjadi, disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Sumatera Utara sehingga tercipta pemahaman akan nilai – nilai kebangsaan.

E. Pembinaan Batas Wilayah

Penataan batas wilayah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan sarana untuk membina kesatuan dan persatuan bangsa dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Saat ini NKRI telah memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dengan segmen batas daerah yang harus ditegaskan adalah 969 segmen (158 segmen batas antar provinsi dan 811 batas antar kabupaten/kota).

Sampai dengan saat ini baru ditegaskan 320 segmen batas, melalui 252 Permendagri, sementara 85 segmen batas dalam proses Permendagri, 354 segmen telah dilakukan pelacakan/pengukuran/pemasangan pilar. Adapun 210 segmen batas belum dilakukan pelacakan.

Sengketa batas wilayah kabupaten/kota dan provinsi, antar lain sebagai berikut :

- 1) Permasalahan batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau, antara lain :
 - a. Batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hilir pada patok 153 Aek Sindur Kecamatan Torgamba;
 - b. Batas Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. Batas Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu pada patok 49 s.d 58.

- 2) Permasalahan batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, antara lain :
 - a. Batas Kabupaten Karo dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Batas Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. Batas Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Gayo Lues;
 - d. Batas Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - e. Batas Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Aceh Singkil;
 - f. Batas Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. Batas Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kota Subulussalam;
 - h. Batas Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Aceh Tenggara.
 - i. Batas Kabupaten Dairi dengan Kota Subulussalam.

- 3) Permasalahan batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat, antara lain :
 - a. Batas Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Batas Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Pasaman;
 - c. Batas Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Pasaman.

- 4) Batas antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dan yang telah diselesaikan, antara lain : Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Binjai, Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai, serta Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun.

Dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah tersebut, dilaksanakan kegiatan antara lain :

- 1) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan konsultasi dengan Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, serta peninjauan lapangan.
- 2) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, dengan hasil kedua pemerintah provinsi sepakat menyerahkan keputusan kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Pemerintahan Umum, untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan batas daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri, dan akan menerima/melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan terlebih dahulu dilakukan pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Barat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

- 4) Permasalahan batas antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, telah dilaksanakan rapat penyelesaian batas daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2016 merupakan bencana alam yang meliputi gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan banjir bandang. Selain terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran permukiman.

Bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016, sebagai berikut :

- 1) Bencana gunung api sebanyak 2 kasus, terjadi meliputi wilayah Kabupaten Karo, dalam tahun 2016 Gunung Sinabung kembali meletus dengan mengeluarkan awan panas yang menyelimuti Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.
- 2) Bencana banjir sebanyak 73 kasus, terjadi di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara dan Mandailing Natal.
- 3) Bencana angin puting beliung sebanyak 75 kasus yang melanda 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten Tapanuli Utara, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan dan Gunungsitoli.

- 4) Bencana kebakaran lahan sebanyak 175 kasus yang terjadi pada daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan dan Kota Sibolga.
- 5) Bencana tanah longsor sebanyak 34 kasus, menimpa beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu : Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Dairi, Mandailing Natal, Samosir, Labuhanbatu Selatan, Kota Medan, Sibolga dan Gunungsitoli.
- 6) Bencana gempa bumi sebanyak 6 kasus, terjadi di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padang Lawas.
- 7) Bencana kekeringan sebanyak 7 kasus, melanda di dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Padangsidimpuan.
- 8) Bencana kebakaran pemukiman sebanyak 86 kasus, terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Nias Barat dan Kota Medan, di wilayah daerah-daerah banyak permukiman warga masyarakat.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan kebencanaan kepada apratur desa dan kecamatan rawan bencana di Sumatera Utara.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam mengupayakan penanggulangan bencana.

- 4) Melakukan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah rawan bencana.
- 5) Menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana.
- 6) Melakukan penguatan terhadap desa-desa daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana dengan pelatihan dan pengembangan desa tangguh bencana.
- 7) Menyiapkan tim reaksi cepat (satuan tugas) dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

G. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dikembangkan dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai salah satu pusat pengembangan area industri berbasis kelapa sawit, KEK Sei Mangkei berlokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan total areal seluas 1933.80 Ha, dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012. Untuk mendukung pembangunan di KEK Sei Mangkei, maka diformulasikan kawasan pengembangan yang kemudian dikenal dengan Kawasan Pengembangan Sei Mangkei, yang mencakup area KEK itu sendiri sebagai wilayah inti dan lingkungan sekitarnya sebagai area yang terpengaruh.

Menindaklanjuti pengembangan Sei Mangkei sebagai kawasan ekonomi khusus, penyusunan tata ruang kawasan pengembangan Sei Mangkei dikaji dari berbagai aspek, yaitu :

- 1) Keterkaitan dan kebutuhan bahan mentah, antara lain perkebunan kelapa sawit untuk mendukung KEK Sei Mangkei.
- 2) Kebutuhan akan infrastruktur yang terkait dengan masukan dan keluaran dari produksi dan pemrosesan kelapa sawit yang dilakukan di Pelabuhan Kuala Tanjung – Distrik BatuBara.
- 3) Pengaruh KEK Sei Mangkei di wilayah sekitar sehubungan dengan aktivitas produksi.

Progres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai berikut :

- 1) *Renewable energy* untuk suplai listrik ke fasilitas di KEK Sei Mangkei, tahun 2011 telah beroperasi.
- 2) Saluran induk tahap I ini dibangun sepanjang 1,9 km Untuk menampung luasan 104 Ha.
- 3) Jalan kawasan yang dibangun dengan kualitas beton K350, dengan ukuran Jalan ROW 62 = 3,4 km; Jalan ROW 43= 0,9 km; Jalan ROW 34 = 0,4 km; Jalan ROW 28 : 1,7 km.
- 4) *Tank Farm* dengan kapasitas 6.000 ton CPKO dan 5.000 ton CPO saat ini dalam Proses penyerahan aset dari Kemenperin ke PTPN III.
- 5) *Dry Port* dengan kapasitas 2.300 TEUs, pemakaian saat ini masih 20 TEUs, dan telah dilakukan uji coba pengiriman barang pada tanggal 5 Desember 2015.
- 6) Kapasitas limbah cair 250 M³/Jam, pemakaian saat ini masih 20 M³/Jam. Dengan syarat mutu inlet COD: 800 ppm dan BOD 600 ppm, dan outlet COD 100 ppm, BOD 50 ppm.
- 7) Pembangunan jalur KA dari dalam Kawasan – Sp Spoor sepanjang 2,95 KM telah selesai, tanggal 24 November 2016 telah dilakukan uji pertama jalur KA KEK Sei Mangkei dan telah dilakukan serah terima dari Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Perhubungan dan telah dilakukan uji coba pada tanggal 5 Desember 2016 dari dalam Kawasan menuju ke Pelabuhan Belawan.

- 8) Pembangunan jaringan telekomunikasi (*fiber optic*) telah dibangun dan saat ini fasilitas telekomunikasi telah dipergunakan dengan baik.
- 9) Pembangunan jaringan pipa gas dengan kapasitas 75 MMSCFD, pemakaian untuk kebutuhan PT. UOI sebesar 3 MMSCFD. Yang menjadi kendala adalah harga gas yang masih cukup tinggi.
- 10) Pabrik Palm Kernel Oil 400 ton inti/hari telah beroperasi sejak 2011 yang menghasilkan produk CPKO yang digunakan sebagai bahan baku industry oleokimia PT. UOI.
- 11) Pabrik Oleokimia (PT. UOI) telah beroperasi pada tahun 2015 yang menghasilkan surfactant 15.000 ton/tahun; glyserin 16.500 ton/tahun; soap noodle 40.000 ton/tahun; *fatty acid* 135.000 ton/tahun.

H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari hasil rapat maupun monitoring yang dilaksanakan pada tahun 2016 oleh SKPD Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara bersama instansi terkait dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 ada 253 jumlah potensi konflik yang ada dan selesai sebanyak 28 potensi konflik, sedangkan masih ada 225 potensi konflik yang belum selesai. Adapun rincian potensi konflik tersebut dari aspek :

- 1) Poleksosbud sebanyak 154 buah.
- 2) Sara sebanyak 9 buah.
- 3) Batas Wilayah 14 buah.
- 4) Sumber Daya Alam 48 buah.

Tahun 2016 jumlah unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara sebanyak 108 kali, turun 28% dari tahun 2015 yang sebanyak 151 kali. Unjuk rasa dilakukan oleh elemen masyarakat, Ormas, LSM dan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VI

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan kedepan nantinya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Utara.

Visi pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013-2018 jangka menengah tahap III adalah” menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera”, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Realisasi terhadap rencana ini dapat dilihat dari kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan sebesar 5,18% melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% pada tahun yang sama berdasarkan indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan positif pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,76% dibanding dengan lapangan usaha lainnya. Diikuti oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, real estate, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian dan konstruksi. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh dibawah 5%.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2015 se Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada kisaran 4,11% sampai dengan 6,22%. Mandailing Natal merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,22%, diikuti oleh Padang Lawas Utara 5,94%, Pakpak Bharat 5,93%, Samosir 5,77%, Kota Medan dan Padang Lawas 5,74%. Sedangkan Batu Bara merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 4,11%, diikuti Nias Selatan 4,46%, Toba Samosir 4,55%, Tapanuli Utara sebesar 4,81% dan Tebing Tinggi 4,86%.

Berdasarkan pengamatan di 4 kota penghitungan inflasi Sumatera Utara tahun 2016, yakni Kota Medan sebesar 6,60%, Kota Pematangsiantar sebesar 4,76%, Kota Sibolga sebesar 7,39%, dan Kota Padangsidimpuan

sebesar 4,28%. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2016 mencapai 6,34%, lebih tinggi dari inflasi Nasional yang mencapai 3,02%.

Pembangunan bidang pendidikan mengalami kemajuan dan peningkatan antara lain angka kelulusan siswa, yaitu angka kelulusan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebanyak 295.637 siswa meningkat menjadi 397.318 siswa pada tahun 2016, angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2015 adalah sebanyak 212.574 siswa, meningkat menjadi 210.676 siswa pada tahun 2016, angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 adalah sebanyak 227.815 siswa dan meningkat menjadi 177.569 siswa pada tahun 2016.

Kinerja bidang kesehatan terlihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. AKI tahun 2015 dan 2016, masih mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 yakni 268/100.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2016 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah sebanyak 231 orang dari 303.230 sasaran lahir hidup.

Demikian halnya dengan UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa UHH penduduk Sumatera Utara tahun 2016 adalah 68,29 tahun, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yakni 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 68,21 tahun pada tahun 2015.

Pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan Provinsi sepanjang 127,40 Km, dari target 338,50 km dalam target

RPJMD. Pemeliharaan berkala jalan sepanjang 31,20 Km serta pembangunan/penggantian Jembatan dengan total panjang 375 M.

Selain itu, pada tahun 2015 ada 19 ruas jalan Provinsi yang diusulkan perubahan fungsi dan statusnya menjadi jalan Nasional sepanjang 360.07 Km dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015, sehingga sejak tahun 2016 panjang jalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.632,22 Km dari semula sepanjang 2.249,64 yang penanganannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan panjang jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.688,43 Km yang sebelumnya 3.048,50 Km.

Kondisi ketahanan pangan Sumatera Utara tahun 2015 -2016 cenderung semakin membaik dan kondusif, ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami kenaikan dari 2.526.194 ton tahun 2015, menjadi 2.764.719 ton tahun 2016 (ARAM II) terjadi kenaikan produksi sebesar 238.525 ton, tetapi bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2016 sebesar 1.739.437,066 ton, masih terdapat surplus sebesar 1.025.281,934 ton. Pengelolaan komoditi unggulan terus mengalami peningkatan seperti pengelolaan kelapa sawit dan produk turunannya, demikian juga dengan sektor perikanan, baik dari hasil tangkapan maupun budidaya terus mengalami peningkatan. Untuk mendukung peningkatan komoditi unggulan Sumatera Utara, terus dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti penyediaan energi listrik dan gas, pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota, serta percepatan kawasan ekonomi khusus untuk menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian kinerja tahun 2016 merupakan upaya kerja keras semua pihak baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun unsur legislative serta instansi vertikal yang juga tidak kalah pentingnya peran swasta. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungan dalam proses pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap semua pihak dapat terus memberikan masukan serta saran yang konstruktif guna kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara, oleh karena itu tanggapan dan saran dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan atau melalui surat elektronik ke alamat biro_otda@sumutprov.go.id.

Demikian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini disampaikan, semoga Allah S.W.T. Tuhan yang maha kuasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua.

Sekian dan terimakasih.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si